

### PROTEKSI ISI LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

## LAPORAN AKHIR PENELITIAN MULTI TAHUN

ID Proposal: 7c101122-a2ac-47d8-8125-34a2b01b4ed0  
Laporan Akhir Penelitian: tahun ke-2 dari 2 tahun

### 1. IDENTITAS PENELITIAN

#### A. JUDUL PENELITIAN

PENGARUH INDEKS MAQASHID SYARIAH DAN TINGKAT TATA KELOLA ISLAM TERHADAP TINGKAT AGRESIVITAS PAJAK DAN TINGKAT PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM RANGKA MENGUJI TEORI KEAGENAN DAN TEORI LEGITIMASI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

#### B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	Komunikasi publik di era revolusi teknologi informasi dan komunikasi	Ekonomi Syariah

#### C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Kompetitif Nasional	Penelitian Dasar	SBK Riset Dasar	SBK Riset Dasar	3	2

### 2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
KAUTSAR RIZA SALMAN Ketua Pengusul	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya	Akuntansi		5977964	0
Dr Drs DJUWARI M.Hum Anggota Pengusul 1	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya	Akuntansi		6000075	0
Dio Eka Prayitno 1	STIE Perbanas Surabaya	-	Pengumpulan dan Analisis Data	0	0

### 3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
-------	------------

### 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

#### Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian ( <i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i> )	Keterangan ( <i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i> )
2	Buku Hasil Penelitian	sudah terbit	Penerbit INDEKS Jakarta

#### Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian ( <i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i> )	Keterangan ( <i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i> )
2	Prosiding dalam pertemuan ilmiah Internasional	sudah terbit/sudah dilaksanakan	International Conference of Business, Economic & Accounting

### 5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

**Total RAB 2 Tahun Rp. 81,322,000**

**Tahun 1 Total Rp. 0**

**Tahun 2 Total Rp. 81,322,000**

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	HR Pengolah Data	P (penelitian)	1	1,500,000	1,500,000
Analisis Data	Biaya analisis sampel	Unit	1	1,500,000	1,500,000
Analisis Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	2	750,000	1,500,000
Bahan	ATK	Paket	4	250,000	1,000,000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Unit	25	50,000	1,250,000
Bahan	Barang Persediaan	Unit	25	100,000	2,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar internasional	Paket	1	15,072,000	15,072,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Luaran KI (paten, hak cipta dll)	Paket	1	5,000,000	5,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya penyusunan buku termasuk book chapter	Paket	1	30,000,000	30,000,000
Pelaporan, Luaran	HR Sekretariat/Administrasi	OB	4	750,000	3,000,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Wajib, dan Luaran Tambahan	Peneliti				
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di luar kantor	OH	10	350,000	3,500,000
Pengumpulan Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	4	750,000	3,000,000
Pengumpulan Data	Uang harian rapat di luar kantor	OH	10	350,000	3,500,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti	OJ	20	75,000	1,500,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	OH	20	150,000	3,000,000
Sewa Peralatan	Peralatan penelitian	Unit	2	1,500,000	3,000,000
Sewa Peralatan	Obyek penelitian	Unit	2	750,000	1,500,000

## 6. HASIL PENELITIAN

**A. RINGKASAN:** Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

Penelitian tahun ke-2 bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh indeks maqashid syariah, tata kelola Islami dan tingkat agresivitas pajak terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada bank syariah di Indonesia. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian digunakan pelaporan sosial Islami. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena bertujuan untuk mengkonfirmasi peranan teori legitimasi dalam menjelaskan pengaruh indeks maqashid syariah, tingkat tata kelola Islami dan tingkat agresivitas pajak terhadap tingkat pelaporan sosial Islami. Penelitian tahun ke-2 ini menggunakan teori keagenan dan teori legitimasi sebagai teori dasar yang menjelaskan hubungan antara variabel indeks maqashid syariah, tingkat tata kelola Islami, tingkat agresivitas pajak terhadap tingkat pelaporan sosial Islami. Berdasarkan sumber data, penelitian saat ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui website Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan website masing-masing bank syariah berupa laporan keuangan (financial statement), laporan tahunan (annual report), dan laporan good corporate governance (GCG) dalam periode 7 (tujuh) tahun yaitu 2010-2016. Unit analisis dalam penelitian ini adalah badan yaitu Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Jumlah sampel penelitian adalah sebelas Bank Umum Syariah periode 2010-2016. Analisis data dalam penelitian ini digunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan software SmartPLS versi terbaru yaitu versi 3.0 dengan beberapa pertimbangan, yaitu: (1) sampel penelitian ini relatif kecil yaitu 11 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan periode penelitian 7 (tujuh) tahun 2010-2016, dan (2) variabel penelitian (indeks maqashid syariah, tingkat tata kelola Islami, tingkat agresivitas pajak, dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan) merupakan variabel yang diukur dengan beberapa indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks maqashid syariah dan tingkat agresivitas pajak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pelaporan sosial Islami, sedangkan tingkat tata kelola Islami tidak berpengaruh terhadap tingkat pelaporan sosial Islami. Penelitian ini diajukan dengan menggunakan skema Penelitian Dasar (PD) multitalahun rentang waktu 2 (dua) tahun. TKT yang diharapkan dapat dicapai adalah TKT 3. Pada tahun kedua ini, luaran wajib adalah buku referensi yang akan diterbitkan pada Penerbit Mitra Wacana Media (MWM) yang bertempat kedudukan di Bogor dan telah terdaftar di IKAPI. Naskah buku

referensi telah dicetak oleh penerbit MWM dan telah memperoleh ISBN. Selain itu, luaran tambahan dari penelitian tahun kedua adalah artikel hasil penelitian dapat dipresentasikan dalam Konferensi Internasional. Pada 1-2 Oktober 2020, output dari laporan ini telah dipresentasikan dalam International Virtual Conference on Interdisciplinary Research In Higher Education yang diselenggarakan International Association of Scholarly Publishers, Editors & Reviewers Inc. yang berkantor pusat di Filipina. Dengan demikian, luaran wajib dan luaran tambahan dari Skema Penelitian Dasar multi tahun (2019-2020) ini telah tercapai.

**B. KATA KUNCI:** Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

## Indeks Maqashid Syariah, Tata Kelola Islami, Agresivitas Pajak, Pelaporan Sosial Islami

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/modifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

## 5.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Sebelas bank umum syariah (BUS) di Indonesia menjadi sampel dalam penelitian ini karena Bank Umum Syariah (BUS) menerbitkan laporan keuangan (financial statement) dan laporan tahunan (annual report) periode 2010-2016. Bank Umum Syariah (BUS) menerbitkan laporan tata kelola (good corporate governance) periode 2010-2016. Bank Umum Syariah (BUS) memiliki informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Bank Umum Syariah (BUS) memiliki data tentang laba fiskal, laba akuntansi, beban pajak, dan beban pajak kini. Sebelas BUS tersebut meliputi: Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah (BRIS), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), dan Bank Maybank Syariah Indonesia.

## 5.2 Deskripsi Variabel Penelitian

### 5.2.1 Deskripsi Variabel Kinerja Maqashid Syariah

Variabel kinerja maqashid syariah (X1) yang diteliti meliputi 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu kinerja mendidik individu (X1.1), kinerja membangun keadilan (X1.2), dan kinerja kepentingan publik (X1.3). Indikator mendidik individu (X1.1) diperoleh dengan menghitung 4 (empat) rasio yang meliputi: biaya pendidikan dibagi total biaya (R1), biaya penelitian dibagi total biaya (R2), biaya pelatihan dibagi total biaya (R3), dan biaya promosi dibagi total biaya (R4). Statistik deskriptif mengenai variabel kinerja maqashid syariah disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Maqashid Syariah

Indikator	n	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
<b>X1.1</b>	77	0	0,0088	0,0033	<b>0,0022</b>
<b>X1.2</b>	77	-0,0436	0,5019	0,1934	<b>0,0569</b>
<b>X1.3</b>	<b>77</b>	<b>-0,1449</b>	<b>0,1250</b>	<b>0,0903</b>	<b>0,0290</b>

Indikator X1.1 memiliki nilai minimum 0, maksimum sebesar 0,0088, dan rata-rata (mean) sebesar 0,0033. Nilai minimum sebesar 0 diperoleh oleh Bank Victoria Syariah dan Maybank Syariah pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Hal ini disebabkan pada laporan tahunan (annual report) kedua bank umum syariah tersebut tidak terdapat angka atau informasi yang berkaitan dengan biaya pendidikan, biaya penelitian, biaya pelatihan, dan biaya promosi. Nilai maksimum sebesar 0,01 diperoleh BNI Syariah rentang waktu tahun 2010-2016. Selain BNI Syariah, nilai indikator mendidik individu (X1.1) yang tinggi juga diperoleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia memperoleh skor 0,01 pada tahun 2010, 2013, dan 2015.

Indikator kedua yaitu membangun keadilan (X1.2) diperoleh dengan menghitung 3 (tiga) rasio yang meliputi: laba bersih dibagi dengan total pendapatan (R5), pembiayaan mudharabah dan musarakah dibagi dengan total aktiva (R6), dan pendapatan bebas bunga dibagi dengan total pendapatan (R7). Indikator X1.2 menunjukkan nilai minimum sebesar -0,04, nilai maksimum sebesar 0,50, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,1934. Nilai minimum sebesar -0,04 diperoleh Bank Maybank Syariah pada tahun 2015 karena pada tahun 2015 Maybank Syariah mengalami kerugian bersih sebesar 294 Miliar. Pada tahun 2016, indikator X1.2 di Maybank Syariah juga bernilai negatif sebesar -0,024 karena pada tahun 2016 mengalami kerugian bersih sebesar 163 Miliar. Nilai maksimum sebesar 0,50 diperoleh Maybank Syariah pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan kinerja Maybank Syariah dilihat dari indikator X1.2 disebabkan skor 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2015 dan 2016 menunjukkan angka negatif sebesar -0,04 dan -0,024.

Indikator ketiga yaitu kepentingan publik (X1.3) diperoleh dengan menghitung 3 (tiga) rasio yaitu laba bersih dibagi total aktiva (R8), zakat dibagi laba bersih (R9), dan deposito investasi dibagi total deposito (R10). Dapat dilihat bahwa indikator X1.3 memiliki nilai minimum sebesar -0,14, nilai maksimum sebesar 0,13, dan rata-rata

(mean) sebesar 0,0903. Nilai minimum sebesar -0,14 diperoleh Bank Victoria Syariah pada tahun 2015. Nilai tersebut disebabkan pada tahun 2015, Bank Victoria Syariah mengalami kerugian bersih sebesar 24 Miliar. Meskipun demikian, secara keseluruhan selain tahun 2015 Bank Victoria Syariah memperoleh skor yang tinggi untuk indikator X1.3 yaitu sebesar 0,10. Adapun nilai maksimum sebesar 0,13 diperoleh Bank BRI Syariah pada 2014. Selain Bank BRI Syariah, Bank Muamalat juga memperoleh skor yang tinggi untuk indikator ketiga sebesar 0,11 pada tahun 2014, Bank Panin Syariah sebesar 0,10 pada tahun 2010-2011, Bank BRI Syariah 0,10 pada tahun 2011, Bank Jabar Banten Syariah sebesar 0,10 pada tahun 2015, dan Bank Mega Syariah sebesar 0,10 pada tahun 2016.

### 5.2.2 Deskripsi Variabel Tingkat Tata Kelola Islami

Variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2) yang diteliti meliputi 11 (sebelas) indikator, yaitu Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (X2.1); Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (X2.2); Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite (X2.3); Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (X2.4); Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa (X2.5); Penanganan benturan kepentingan (X2.6); Penerapan fungsi kepatuhan Bank (X2.7); Penerapan fungsi audit intern (X2.8); Penerapan fungsi audit ekstern (X2.9); Batas Maksimum Penyaluran Dana (X2.10); dan Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan (X2.11). Statistik deskriptif mengenai variabel Tingkat Tata Kelola Islami disajikan pada Tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2 Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Tata Kelola Islami

<b>Indikator</b>	<b>n</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maksimum</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Standar Deviasi</b>
<b>X2.1</b>	77	0,125	0,5	0,1897	<b>0,0765</b>
<b>X2.2</b>	77	0,175	0,53	0,2781	<b>0,1139</b>
<b>X2.3</b>	77	0,1	0,3	0,1897	<b>0,0527</b>
<b>X2.4</b>	77	0,1	0,3	0,1684	<b>0,0539</b>
<b>X2.5</b>	77	0,05	0,15	0,0919	<b>0,0255</b>
<b>X2.6</b>	77	0,1	0,41	0,1795	<b>0,0634</b>
<b>X2.7</b>	77	0,05	0,15	0,091	<b>0,0275</b>
<b>X2.8</b>	77	0,05	0,15	0,0984	<b>0,0215</b>
<b>X2.9</b>	77	0,05	0,135	0,0675	<b>0,0245</b>
<b>X2.10</b>	77	0,05	0,22	0,0802	<b>0,0345</b>
<b>X2.11</b>	<b>77</b>	<b>0,15</b>	<b>0,45</b>	<b>0,2807</b>	<b>0,0766</b>

Indikator pertama dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.1) adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Indikator X2.1 nilai minimum sebesar 0,1250, nilai maksimum sebesar 0,5, dan rata-rata (mean) sebesar 0,1897. Semakin rendah skor dari indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris semakin baik di bank syariah. Bank Mega Syariah memperoleh nilai minimum sebesar 0,125 yang menunjukkan kinerja terbaik dari Dewan Komisaris pada tahun 2010, 2011, 2012, 2014, dan 2015. Bank Muamalat memperoleh skor sebesar 0,125 secara berturut-turut pada periode 2010-2014. Bank BNI secara berturut-turut selama periode 2010-2016 memperoleh skor sebesar 0,125 kecuali di tahun 2016.

Adapun skor sebesar 0,5 diperoleh Maybank Syariah pada tahun 2012 yang menunjukkan kinerja terendah dari seluruh bank syariah pada periode 2010-2016.

Indikator kedua dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.2) adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Indikator X2.2 nilai minimum sebesar 0,175, nilai maksimum sebesar 0,53, dan rata-rata (mean) sebesar 0,2781. Skor yang lebih kecil menunjukkan kinerja Direksi yang semakin baik dalam hal tugas dan tanggung jawabnya. Skor minimum sebesar 0,175 diperoleh Bank Muamalat Indonesia (BM) pada tahun 2010-2015; Bank Syariah Bukopin pada tahun 2010-2016; Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010, 2011, 2015, dan 2016; Bank Victoria Syariah pada tahun 2010 dan 2013; Bank BRI Syariah pada tahun 2011-2013; Bank BNI Syariah pada tahun 2012-2015; Bank Mega Syariah pada tahun 2012 dan 2014; Bank Panin Syariah pada 2012-2016. Adapun skor maksimum sebesar 0,5300 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2010-2012, Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2012, Maybank Syariah pada tahun 2013-2014. Sejak tahun 2015, tidak ada

bank syariah memperoleh skor sebesar 0,53 sehingga menunjukkan secara umum bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Indikator ketiga dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.3) adalah kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite. Indikator X2.3 memiliki nilai minimum sebesar 0,1000, nilai maksimum sebesar 0,3, dan rata-rata (mean) sebesar 0,5272. Skor yang lebih kecil menunjukkan semakin baik kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite. Skor minimum sebesar 0,1 diperoleh Bank BNI Syariah pada periode 2010-2016, kecuali pada tahun 2016 memperoleh skor sebesar 0,2. Adapun skor maksimum sebesar 0,3 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2010-2012, dan Bank Panin Syariah pada tahun 2010-2011.

Indikator keempat dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.4) adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Indikator X2.4 nilai minimum sebesar 0,1, nilai maksimum sebesar 0,3, dan rata-rata (mean) sebesar 0,0539. Semakin rendah skor menunjukkan kinerja bank syariah semakin baik dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adanya tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Nilai minimum sebesar 0,1 diperoleh Bank Victoria Syariah pada tahun 2010; Bank BNI Syariah pada tahun 2010; Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2010; Maybank Syariah pada tahun 2010; Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011-2016; Bank Panin Syariah pada tahun 2012-2014; Bank BCA Syariah pada tahun 2012-2016; Bank BRI Syariah pada tahun 2012-2013; Bank Mega Syariah pada tahun 2014-2016; Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015; dan Bank Syariah Bukopin pada tahun 2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,3 diperoleh Bank BNI Syariah pada tahun 2014 dan 2015 serta Bank Victoria Syariah pada tahun 2016.

Indikator kelima dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.5) adalah pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Indikator X2.5 memiliki nilai minimum sebesar 0,05, nilai maksimum sebesar 0,15, dan rata-rata (mean) sebesar 0,0919. Skor semakin rendah menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip syariah oleh bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa semakin baik. Nilai minimum sebesar 0,05 diperoleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2010-2016; Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 dan 2016; Bank Panin Syariah pada tahun 2011-2013; Bank Mega Syariah pada tahun 2014 dan 2015; Bank BCA Syariah pada tahun 2014; Bank Syariah Bukopin pada tahun 2016; serta Bank BNI Syariah pada tahun 2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,15 diperoleh Bank Victoria dan Bank BCA Syariah pada tahun 2010, serta Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2016.

Indikator keenam dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami adalah penanganan benturan kepentingan. Indikator X2.6 memiliki nilai minimum sebesar 0,1, nilai maksimum sebesar 0,41, dan rata-rata (mean) sebesar 0,1795. Sebagaimana indikator-indikator sebelumnya, semakin rendah skor indikator ini menunjukkan bahwa penanganan benturan kepentingan di bank syariah semakin baik.

Sebaliknya, semakin tinggi skor menunjukkan penanganan benturan kepentingan semakin tidak baik. Nilai minimum sebesar 0,1 diperoleh Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2010 dan 2016; Bank BNI Syariah pada tahun 2011, 2012, 2015, 2016; Bank BRI Syariah pada tahun 2011-2013; Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011-2016; Bank Panin Syariah pada tahun 2012; Bank BCA Syariah pada tahun 2013-2016; Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2015; Bank Mega Syariah pada tahun 2016; dan Bank Syariah Bukopin pada tahun 2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,41 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2014.

Indikator ketujuh dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.7) adalah penerapan fungsi kepatuhan Bank. Indikator X2.7 mempunyai nilai minimum sebesar 0,05, nilai maksimum sebesar 0,15, dan rata-rata (mean) sebesar 0,091. Semakin rendah skor indikator ini menunjukkan semakin baik penerapan fungsi kepatuhan di bank syariah. Nilai minimum sebesar 0,05 diperoleh Bank Muamalat

Indonesia pada tahun 2010-2016; Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 dan 2016; Bank BRI Syariah pada tahun 2012-2013, Bank BNI Syariah pada tahun 2013-2015; Bank BCA Syariah pada tahun 2014- 2016; Bank Syariah Bukopin pada tahun 2016; dan Bank Panin Syariah pada tahun 2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,15 diperoleh Bank Panin Syariah pada tahun 2010; dan Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2010-2011 serta 2014-2016.

Indikator kedelapan dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.8) adalah penerapan fungsi audit intern. Diketahui bahwa indikator X2.8 memiliki nilai minimum sebesar 0,05, nilai maksimum sebesar 0,15, dan rata-rata (mean) sebesar 0,0984. Semakin rendah skor indikator ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi audit intern di bank syariah semakin baik. Nilai minimum sebesar 0,05 yang menunjukkan kinerja yang paling baik dalam hal penerapan fungsi audit internal diperoleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010, 2015, dan 2016; Bank Mega Syariah pada tahun 2011 dan 2012; Bank BNI Syariah pada tahun 2013 dan 2014; Bank BCA Syariah pada tahun 2015 dan 2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,15 yang menunjukkan kinerja yang kurang baik diperoleh Bank Panin Syariah dan Bank BCA Syariah pada tahun 2010, dan Maybank Syariah pada tahun 2012.

Indikator kesembilan dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.9) adalah penerapan fungsi audit ekstern. Indikator X2.9 menghasilkan nilai minimum sebesar 0,05, nilai maksimum sebesar 0,135, dan rata-rata (mean) sebesar 0,0675. Nilai indikator yang lebih kecil menunjukkan bahwa penerapan fungsi audit ekstern di bank syariah semakin baik. Sebagian besar bank syariah memperoleh nilai sebesar 0,05 seperti Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri. Maybank Syariah memperoleh skor sebesar 0,1 pada periode 2010-2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,135 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2016.

Indikator kesepuluh dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.10) adalah Batas Maksimum Penyaluran Dana. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa (X2.10) nilai minimum sebesar 0,05, nilai maksimum sebesar 0,22, dan rata-rata (mean) sebesar 0,0802. Semakin rendah skor dari indikator kesepuluh ini menunjukkan bahwa bank syariah semakin baik dalam hal batas maksimum penyaluran dana. Nilai minimum sebesar 0,05 diperoleh Bank Syariah Bukopin pada tahun 2010-2013; Bank BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri pada periode 2010-2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,2200 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2015 dan 2016.

Indikator kesebelas dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.11) adalah Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. Indikator X2.11 memiliki nilai minimum sebesar 0,15, nilai maksimum sebesar 0,45, dan rata-rata (mean) sebesar 0,2807. Semakin kecil skor dari indikator kesebelas (X2.11) menunjukkan bahwa semakin transparan kondisi keuangan dan non keuangan serta semakin baik pelaporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. Nilai minimum sebesar 0,15 banyak diperoleh bank syariah pada periode 2012-2016 diantaranya diperoleh Bank Syariah Bukopin pada tahun 2012-2016, Bank BNI Syariah pada tahun 2012-2013, dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2012-2013. Selanjutnya, skor sebesar 0,15 juga diperoleh Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2013. Adapun nilai maksimum sebesar 0,45 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2016.

### 5.2.3 Deskripsi Variabel Tingkat Agresivitas Pajak

Variabel tingkat agresivitas pajak (Y1) yang diteliti meliputi 5 (lima) indikator, yaitu Current Tax Expense (CTE), Tax Expense (TE), GAAP effective tax rate (GETR), Cash effective tax rate (CETR), dan Fiscal effective tax rate (FETR). Statistik deskriptif variabel Tingkat Agresivitas Pajak ditampilkan pada Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3 Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Agresivitas Pajak

<b>Indikator</b>	<b>n</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maksimum</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Standar Deviasi</b>
<b>Y1.1</b>	77	0	3,206	0,4203	<b>0,6495</b>
<b>Y1.2</b>	77	-1,3126	2,9144	0,3563	<b>0,638</b>
<b>Y1.3</b>	77	-0,2974	0,5725	0,2567	<b>0,1131</b>
<b>Y1.4</b>	77	-0,314	0,629	0,2544	<b>0,1541</b>
<b>Y1.5</b>	<b>77</b>	<b>-0,139</b>	<b>2,1226</b>	<b>0,2826</b>	<b>0,2669</b>

Indikator pertama dari variabel tingkat agresivitas pajak adalah beban pajak kini (Y1.1). Diketahui bahwa nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 3,20601, dan nilai rata-rata sebesar 0,4203046. Nilai minimum sebesar 0 diperoleh beberapa bank syariah diantaranya Bank Panin Syariah dan Bank Bukopin Syariah pada tahun 2010, Bank Victoria Syariah pada tahun 2011, Bank Victoria Syariah dan Maybank Syariah pada tahun 2015, serta Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Maybank Syariah pada tahun 2016. Skor sebesar 0 terjadi karena bank syariah memiliki beban pajak kini (current tax expense) sebesar 0 (nihil) dan disebabkan karena laba fiskal yang negatif. Adapun nilai maksimum sebesar 3,20601 diperoleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012. Bank Syariah Mandiri juga memperoleh skor tinggi sebesar 1,98460 pada tahun 2010; 2,07954 pada tahun 2011; dan 2,55966 pada tahun 2013. Selain itu, Bank Mega Syariah juga memperoleh skor tinggi sebesar 2,30011 pada tahun 2012.

Indikator kedua dari variabel tingkat agresivitas pajak adalah beban pajak (Y1.2). Diketahui bahwa nilai minimum sebesar -1,3126, nilai maksimum sebesar 2,9144, dan nilai rata-rata sebesar 0,356281. Nilai minimum sebesar -1,3126 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2016. Beban pajak (tax expense) negatif



menunjukkan bahwa Bank Jabar Banten Syariah memiliki beban pajak kini (current tax expense) nihil dan penghasilan pajak tangguhan (deffered tax income) sebesar Rp131.263.251.000. Adapun nilai maksimum sebesar 2.9144 diperoleh Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2012 karena pada tahun tersebut BSM memiliki beban pajak sebesar Rp291.442.081.821. Bank Syariah Mandiri juga memperoleh skor yang tinggi pada tahun 2013 sebesar 2,32596 karena BSM menghasilkan beban pajak sebesar Rp232.596.232.345.

Indikator ketiga dari variabel tingkat agresivitas pajak adalah GETR (Y1.3). Indikator GETR dihitung dari beban pajak (tax expense) dibagi dengan laba akuntansi (pre-tax book income). Skor yang lebih tinggi dari variabel tingkat agresivitas pajak mengindikasikan perusahaan kurang agresif dalam pembayaran pajaknya, sebaliknya skor yang lebih rendah mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Tabel 5.6 menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar -0,2974, nilai maksimum sebesar 0,5725, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,256651. Nilai minimum sebesar -0,2974 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2012. Adapun nilai maksimum sebesar 0,5725 diperoleh Bank BRI Syariah pada tahun 2014. Bank Jabar Banten Syariah juga memperoleh skor yang tinggi sebesar 0,54365 pada tahun 2015. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua bank syariah tersebut kurang agresif dalam hal pajak penghasilan.

Indikator keempat dari variabel tingkat agresivitas pajak adalah CETR (Y1.4). Indikator CETR dihitung dari beban pajak kini (current tax expense) dibagi dengan laba akuntansi (pre-tax book income). Dari Tabel 5.7, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar -0,3140, nilai maksimum sebesar 0,6290, dan nilai rata-rata sebesar 0,254387. Nilai minimum sebesar -0,3140 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2012. Bank Jabar Banten Syariah juga memperoleh skor yang rendah sebesar - 0,35314 pada tahun 2011. Pada tahun 2011, meskipun Bank Jabar Banten Syariah memperoleh rugi bersih secara akuntansi sebesar Rp25.769.000.000 tetapi menghasilkan beban pajak kini sebesar Rp9.100.000.000. Hal ini disebabkan pada tahun 2011, terjadi koreksi fiskal positif sehingga menghasilkan laba fiskal sebesar Rp61.577.000.000. Demikian pula pada tahun 2012, meskipun Bank Jabar Banten Syariah memiliki rugi bersih sebesar Rp21.417.000.000 tetapi menghasilkan beban pajak kini sebesar Rp6.725.000.000. Nilai maksimum sebesar 0,6290 diperoleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 karena pada tahun tersebut Bank Syariah Mandiri berhasil membukukan beban pajak kini sebesar Rp69.059.284.500 dan laba akuntansi sebesar Rp109.793.613.822. Selain Bank Syariah Mandiri, pada tahun 2014 Bank Muamalat Indonesia juga memperoleh skor yang cukup tinggi untuk indikator ini yaitu sebesar 0,62237 karena pada tahun tersebut Bank Muamalat Indonesia membukukan beban pajak kini sebesar Rp61.641.981.000 dan laba akuntansi sebesar Rp99.044.264.000.

Indikator kelima dari variabel tingkat agresivitas pajak adalah FETR (Y1.5). Indikator CETR dihitung dari beban pajak (tax expense) dibagi dengan laba fiskal (adjusted pre-tax income). Skor yang lebih besar menunjukkan bahwa bank syariah kurang agresif dalam perencanaan pajaknya, sebaliknya skor yang lebih rendah menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang tinggi di bank syariah. Diketahui bahwa nilai minimum sebesar -0,1390, nilai maksimum sebesar 2,1226, dan nilai rata-rata sebesar 0,282566. Nilai minimum sebesar -0,1390 diperoleh Maybank Syariah pada tahun 2016 karena pada tahun 2016 Maybank Syariah memiliki beban pajak sebesar Rp19.191.000.000 dan rugi fiskal sebesar Rp-138.047.000.000 sebagaimana ditampilkan pada Lampiran 5.49. Adapun nilai maksimum sebesar 2,1226 diperoleh Bank Panin Syariah pada tahun 2011. Pada tahun 2011, Bank Panin Syariah memperoleh beban pajak sebesar Rp3.177.368.000 dan laba fiskal sebesar Rp1.496.907.000.

#### 5.2.4 Tingkat Pelaporan Sosial Islami

Variabel tingkat pelaporan sosial Islami (Y2) yang diteliti meliputi 6 (enam) indikator, yaitu finance and investment (Y2.1), products and services (Y2.2), employee (Y2.3), society (Y2.4), environment (Y2.5), dan corporate governance (Y2.6). Indikator Y2.1 dalam penelitian ini meliputi 6 (enam) item pengungkapan yaitu aktivitas riba, ketidakjelasan (gharar), zakat, penghapusan piutang tidak tertagih (bad debts written-off), current value balance sheet, dan value added statement. Statistic deskriptif variabel tingkat pelaporan sosial Islami ditampilkan pada Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4 Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Pelaporan Sosial Islami

<b>Indikator</b>	<b>n</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maksimum</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Standar Deviasi</b>
<b>Y2.1</b>	77	0,167	0,667	0,372	<b>0,149</b>
<b>Y2.2</b>	77	0,25	1	0,581	<b>0,233</b>
<b>Y2.3</b>	77	0,1	1	0,608	<b>0,225</b>

<b>Y2.4</b>	<b>77</b>	<b>0,091</b>	<b>1</b>	<b>0,679</b>	<b>0,246</b>
<b>Y2.5</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0,571</b>	<b>0,302</b>	<b>0,172</b>
<b>Y2.6</b>	<b>77</b>	<b>0,4</b>	<b>1</b>	<b>0,694</b>	<b>0,123</b>

Indikator finance & investment (Y2.1) memiliki nilai minimum sebesar 0,17, nilai maksimum sebesar 0,67, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,372. Nilai minimum sebesar 0,17 banyak diperoleh bank syariah pada tahun 2010 diantaranya Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Jabar Banten Syariah, dan Maybank Syariah. Hal ini disebabkan karena bank syariah hanya mengungkapkan 1 (satu) aktivitas dari 6 (enam) aktivitas dalam pengungkapan Islamic social reporting (ISR). Bank Panin Syariah hanya mengungkapkan informasi bad debts writen-off dalam laporan tahunannya. Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) hanya mengungkapkan informasi zakat dalam laporan tahunannya. Adapun 4 (empat) informasi lainnya tidak diungkapkan seperti informasi tentang aktivitas riba, gharar, neraca nilai saat ini (current value balance sheet), dan laporan nilai tambah (value added statement). Nilai maksimum sebesar 0,67 diperoleh Bank Panin Syariah pada rentang tahun 2013-2016, Bank Syariah Bukopin di tahun 2016, Bank Victoria Syariah di tahun 2016, Bank BNI Syariah di tahun 2015, Bank BRI Syariah di tahun 2013, Bank Muamalat Indonesia pada rentang tahun 2014-2016. Skor Indikator Y2.1 sebesar 0,67 menunjukkan bahwa bank syariah telah mengungkapkan 4 (empat) aktivitas dari 6 (enam) aktivitas dalam pengungkapan Islamic social reporting (ISR). Terdapat 2 (dua) informasi yang tidak diungkapkan oleh seluruh bank syariah berkaitan dengan indikator finance & investment (Y2.1) yaitu current value balance sheet dan value added statement.

Indikator kedua dari variabel tingkat pelaporan sosial Islami adalah tema produk dan jasa (products and services theme). Indikator ini memiliki 4 (empat) item pengungkapan yaitu produk ramah lingkungan (green product), status produk halal (status of product), kualitas produk (product quality), dan keluhan nasabah (customer complaints). Indikator products & service (Y2.2) memiliki nilai minimum sebesar 0,25, nilai maksimum sebesar 1,00, dan nilai rata-rata sebesar 0,5812. Nilai minimum sebesar 0,25 menunjukkan bahwa bank syariah hanya mengungkapkan 1 (satu) item pengungkapan dari total 4 item pengungkapan dari indikator Y2.2. Nilai minimum diperoleh Bank Syariah Bukopin pada tahun 2010, 2011, dan 2014; Bank Victoria Syariah pada tahun 2010 dan 2011; Bank BRI Syariah pada tahun 2010, 2012, 2014, dan 2015; Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2013; serta Maybank Syariah pada tahun 2014-2016. Adapun nilai maksimum sebesar 1 menunjukkan bahwa bank syariah telah mengungkapkan 4 (empat) item pengungkapan dari indikator ini. Nilai maksimum diperoleh Bank BNI Syariah pada tahun 2011, 2013, 2015, dan 2016; Bank BRI Syariah pada tahun 2016; Bank Muamalat Indonesia 2010-2014 dan 2016; serta Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015.

Indikator ketiga dari variabel tingkat pelaporan sosial Islami adalah tema tenaga kerja (employee theme). Indikator ini memiliki 10 (sepuluh) item pengungkapan yaitu sifat pekerjaan (nature of work), pendidikan dan pelatihan (education and training), kesempatan yang sama (equal opportunities), keterlibatan karyawan (employee involvement), kesehatan dan keselamatan (health and safety), lingkungan kerja (working environment), pekerjaan khusus lainnya (employment of other special), eselon yang lebih tinggi di perusahaan melakukan shalat berjama'ah dengan manajer tingkat bawah dan menengah (higher echelons in the company perform the congregational prayers with lower and middle level managers), karyawan muslim diperbolehkan untuk melakukan sholat wajib dan puasa selama bulan Ramadhan pada hari kerja (muslim employees are allowed to perform their obligatory prayers during specific times and fasting during Ramadhan on their working day), dan tempat ibadah yang tepat untuk para karyawan (proper place of worship for the employees).

Pada Tabel 5.7 dapat diketahui bahwa indikator ini memiliki nilai minimum sebesar 0,1, nilai maksimum sebesar 1,0, dan nilai rata-rata sebesar 0,608. Nilai minimum sebesar 0,1 menunjukkan bahwa bank syariah hanya mengungkapkan 1 (satu) item pengungkapan diantara 10 total item pengungkapan. Nilai minimum diperoleh Bank Panin Syariah pada tahun 2010 dan Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2013. Adapun nilai maksimum sebesar 1 menunjukkan bahwa semua item pengungkapan telah diungkapkan oleh bank syariah dalam laporan tahunan (annual report). Nilai maksimum diperoleh Bank Panin Syariah pada tahun 2014; Bank BNI Syariah pada tahun 2012 dan 2015; Bank BRI Syariah pada tahun 2016; serta Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015 dan 2016.

Indikator keempat dari variabel tingkat pelaporan sosial Islami adalah tema masyarakat (society theme). Indikator ini memiliki 11 (sebelas) item pengungkapan yaitu sadaqah, wakaf, dana kebajikan (qard hasan), kesadaran karyawan (employee volunteerism), skema beasiswa pendidikan-sekolah (education-school adoption scheme (scholarships), pekerjaan lulusan (graduate employment), pengembangan pemuda (youth development), masyarakat kurang mampu (underprivilage community), perawatan anak (children care), aktivitas sosial/hadiah/amal (charities/gifts/social activities), dan mensponsori kesehatan masyarakat (sponsoring public health). Indikator ini memiliki nilai minimum sebesar 0,0909, nilai maksimum sebesar 1,00, dan nilai rata-rata

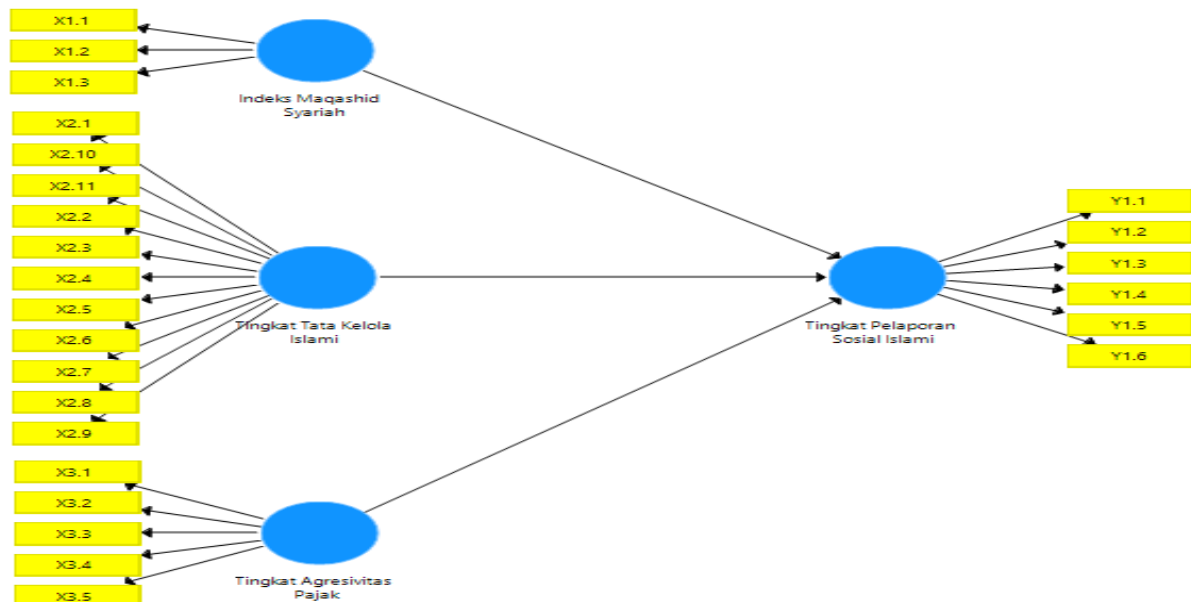
sebesar 0,6789. Nilai minimum sebesar 0,0909 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2010 karena hanya mengungkapkan 1 (satu) item pengungkapan dari total 11 (sebelas) item pengungkapan. Bank Jabar Banten Syariah hanya mengungkapkan informasi aktivitas sosial saja. Adapun nilai maksimum sebesar 1,00 diperoleh Bank BNI Syariah pada tahun 2011, 2012, dan 2016 yang menunjukkan bahwa seluruh item informasi telah diungkapkan oleh Bank BNI Syariah.

Indikator kelima dari variabel tingkat pelaporan sosial Islami adalah tema lingkungan (environment theme). Indikator ini (Y2.5) memiliki 7 (tujuh) item pengungkapan yang meliputi: konservasi lingkungan (conservation of environment), satwa liar yang terancam punah (endangered wildlife), pencemaran lingkungan (environmental pollution), edukasi lingkungan (environmental education), produk/proses terkait lingkungan (environmental products/process related), audit/laporan verifikasi independen/tata kelola lingkungan (environmental audit/independent verification statement/governance), dan sistem/kebijakan manajemen lingkungan (environmental management system/policy). Indikator ini memiliki nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 0,5714, dan nilai rata-rata sebesar 0,3024. Nilai minimum sebesar 0 yang menunjukkan bahwa seluruh informasi tidak diungkapkan diperoleh Bank Panin Syariah pada tahun 2010; Bank BRI Syariah pada tahun 2010 dan 2011; serta Maybank Syariah pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Adapun nilai maksimum sebesar 0,5714 diperoleh Bank Panin Syariah pada tahun 2013 dan 2014; Bank Syariah Bukopin pada tahun 2016; Bank BNI Syariah pada tahun 2011, 2015, dan 2016; Bank BRI Syariah pada tahun 2016; dan Bank Syariah Mandiri pada periode 2010-2016. Skor 0,5714 menunjukkan bahwa bank syariah telah mengungkapkan 4 (empat) informasi dari total 7 (tujuh) item pengungkapan dalam indikator ini.

Indikator keenam dari variabel tingkat pelaporan sosial Islami adalah tema tata kelola (corporate governance theme). Indikator ini (Y2.6) memiliki 5 (lima) item pengungkapan yang meliputi: status kepatuhan syariah (shariah compliance status), struktur kepemilikan (ownership structure), struktur dewan muslim vs non muslim (board structure-muslim vs non-muslim), aktivitas yang diharamkan (forbidden activities), dan kebijakan anti-korupsi (anti-corruption policies). Indikator ini memiliki nilai minimum sebesar 0,4, nilai maksimum sebesar 1, dan nilai rata-rata sebesar 0,694. Nilai minimum sebesar 0,4 diperoleh Bank Victoria Syariah pada periode 2010-2012 dan Bank BRI Syariah pada tahun 2010. Skor 0,4 menunjukkan bahwa bank syariah hanya mengungkapkan 2 (dua) informasi dari total 5 (lima) item pengungkapan dalam indikator ini. Adapun nilai maksimum sebesar 1 hanya diperoleh Bank BRI Syariah pada tahun 2016. Skor sebesar 1 menunjukkan bahwa bank syariah telah mengungkapkan seluruh informasi dalam indikator ini.

### 5.3 Model Penelitian

Model Penelitian pada tahun kedua adalah:



Gambar 5.1 Model Penelitian Tahun Kedua

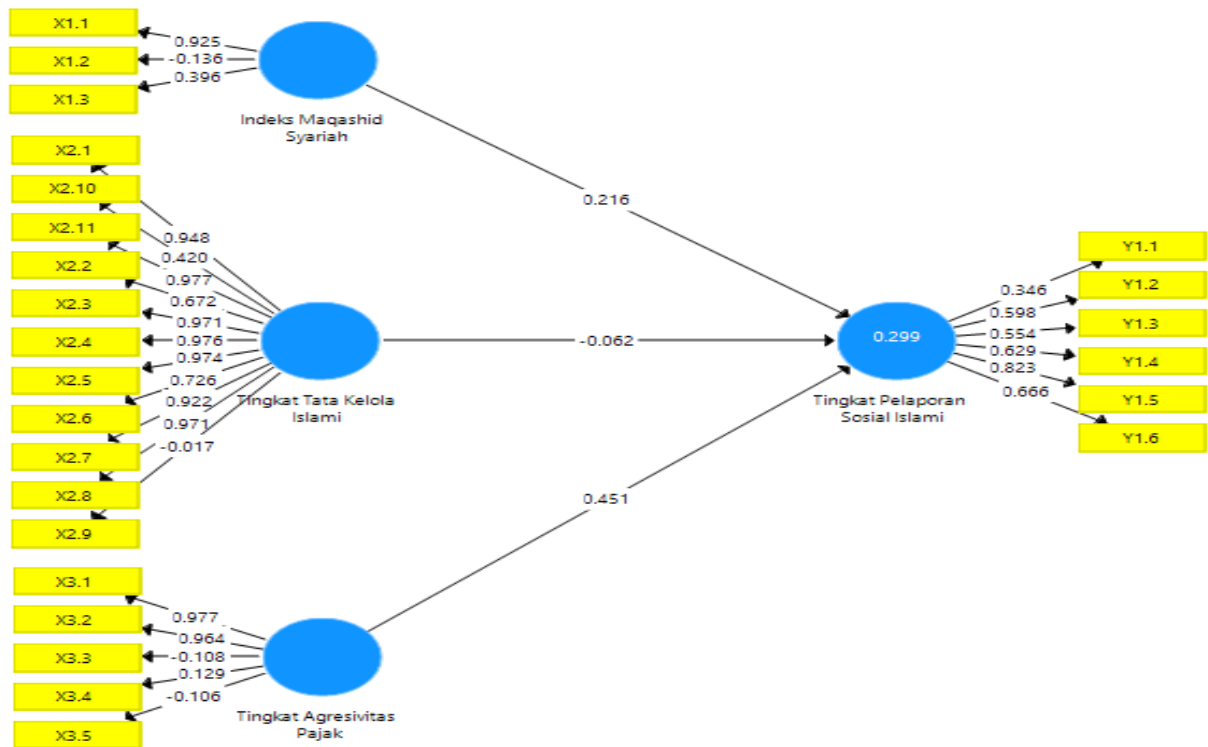
### 5.4 Hasil Pengujian Validitas Konvergen

Berikut adalah ringkasan hasil pengujian validitas konvergen sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Ringkasan Hasil Pengujian Validitas Konvergen Awal

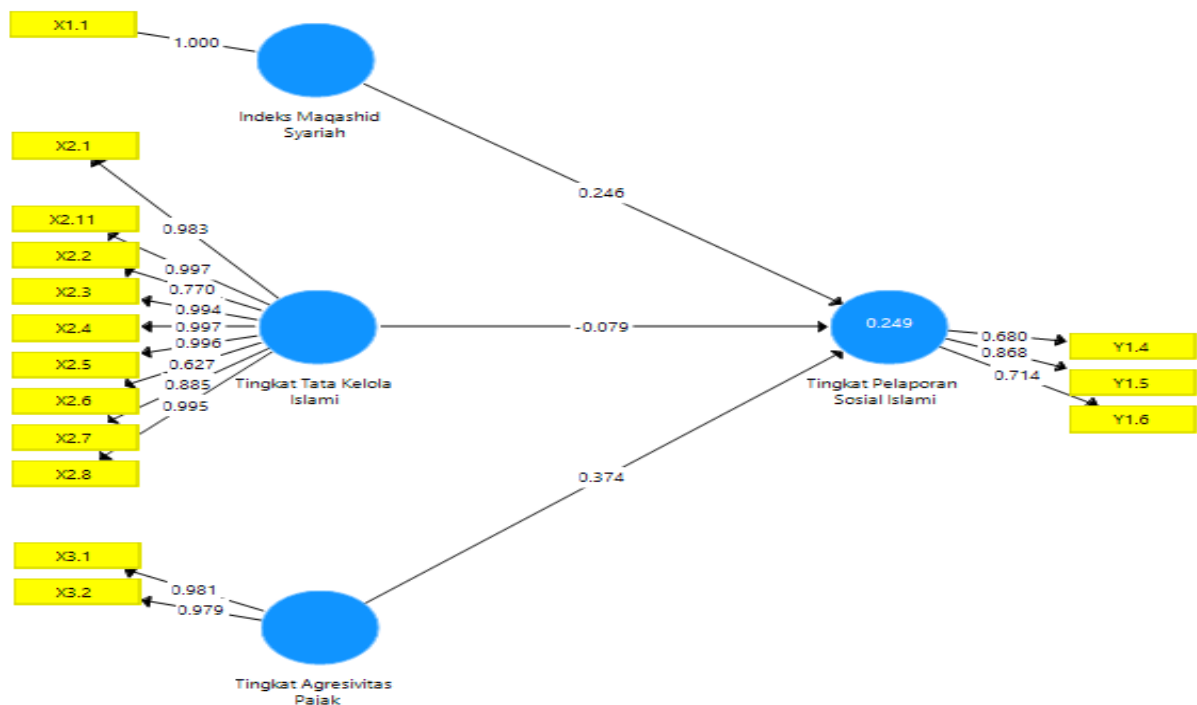
Variabel	Indikator	Loading Factor
<b>Kinerja maqashid syariah (X1)</b>	Mendidik Individu (X1.1)	0,925
	Membangun keadilan (X1.2)	-0,136
	Kepentingan public (X1.3)	0,396
<b>Tingkat Tata Kelola Islami (X2)</b>	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (X2.1)	0,948
	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (X2.2)	0,672
	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite (X2.3)	0,971
	X2.4	0,976
	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa (X2.5)	0,974
	Penanganan benturan kepentingan (X2.6)	0,726
	Penerapan fungsi kepatuhan Bank (X2.7)	0,922
	Penerapan fungsi audit intern (X2.8)	0,971
	Penerapan fungsi audit ekstern (X2.9)	-0,017
	Batas Maksimum Penyaluran Dana (X2.10)	0,420
	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal (X2.11)	0,977
<b>Tingkat Agresivitas Pajak (X3)</b>	Current Tax Expense (X3.1)	0,977
	Current Tax (X3.2)	0,964
	X3.3	-0,108
	X3.4	0,129
	X3.5	-0,106
<b>Tingkat Pengungkapan Tanggung</b>	Finance & Investment (Y2.1)	0,346
	Products (Y2.2)	0,598
	Employee (Y2.3)	0,554
	Society (Y2.4)	0,629
	Environment (Y2.5)	0,823
	Corporate Governance (Y2.6)	0,666

Uji validitas konvergen pertama melalui hasil olah data PLS Algoritm diperlihatkan pada gambar berikut ini:



Gambar 5.1 Hasil Uji Validitas Konvergen Pertama

Hasil Pengujian Validitas Konvergen Kedua, dengan men-delete skor di bawah 0,6 menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi skor di atas 0,6.



Gambar 5.1 Hasil Uji Validitas Konvergen Kedua

Penjelasan dari Gambar 5.1 adalah sebagai berikut:

Pada variabel Kinerja maqashid syariah (X1) hanya terdapat 1 (satu) indikator yang valid yaitu indikator mendidik individu (X1.1). Adapun dua indikator lainnya yaitu membangun keadilan (X1.2) kepentingan publik (X1.3) adalah tidak valid.

Pada variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2), hanya terdapat 1 indikator menunjukkan hasil yang tidak valid yaitu indikator X2.10.

Pada variabel Tingkat Agresivitas Pajak (X3), terdapat 2 indikator yang valid yaitu beban pajak kini (X3.1) dan beban pajak (X3.2). Adapun ketiga indikator lainnya yaitu GETR (X3.3), CETR (X3.4), dan FETR (X3.5) menunjukkan hasil yang tidak valid.

Pada variabel Tingkat Pelaporan Sosial Islami (Y1), indikator menunjukkan hasil yang valid yaitu Society (Y1.4), Environment (Y1.5), dan Corporate Governance (Y1.6), sedangkan indikator yang tidak valid adalah Finance & Investment (Y1.1), Products (Y1.2), dan Employee (Y1.3).

### 5.5 Pengujian Validitas Diskriminan

Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan melihat loading dan cross loading. Syarat validitas diskriminan menunjukkan bahwa nilai korelasi variabel pada dirinya sendiri harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi dengan variabel lainnya. Hasil pengujian validitas diskriminan dapat dilihat pada Tabel 5.6. Tabel 5.6 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki korelasi tertinggi pada dirinya dibandingkan dengan korelasi pada variabel lainnya sehingga syarat validitas diskriminan pada model pengukuran terpenuhi.

Tabel 5.6 Ringkasan Hasil Pengujian Validitas Diskriminan

	<b>Kinerja Maqashid Syariah</b>	<b>Tingkat Agresivitas Pajak</b>	<b>Tingkat Pelaporan Sosial Islami</b>	<b>Tingkat Tata Kelola Islami</b>
<b>Kinerja Maqashid Syariah</b>	1,000			
<b>Tingkat Agresivitas Pajak</b>	0,198	0,980		
<b>Tingkat Pelaporan Sosial Islami</b>	0,323	0,428	0,758	
<b>Tingkat Tata Kelola Islami</b>	-0,036	-0,062	-0,112	0,924

### 5.6 Pengujian Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki reliabilitas yang baik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.7 berikut ini karena memiliki skor di atas 0,6.

Tabel 5.7 Ringkasan Hasil Pengujian Reliabilitas

<b>Variabel</b>	<b>Composite Reliability</b>	<b>Cronbach alpha</b>
<b>Indek Maqashid Syariah</b>	1,000	1,000
<b>Tingkat Agresivitas Pajak</b>	0,980	0,959
<b>Tingkat Pelaporan Sosial Islami</b>	0,800	0,631
<b>Tingkat Tata Kelola Islami</b>	0,981	0,976

### 5.7 R Square

Berdasarkan hasil pengujian melalui software SmartPLS 3.0 diperoleh R Square sebesar 24,9% dan R Square Adjusted sebesar 21,8%.

### 5.8 Pengujian Hipotesis

Tabel 5.8 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan	Hipo-Tesis	Original Sample (O)	T-statistic	P Values	Hasil
Indeks maqashid syariah (X1) → Tingkat Pelaporan Sosial Islami (Y1)	H1	0,246	2,044	0,041	Signifikan
Tingkat Tata Kelola Islami (X2) → Tingkat Pelaporan Sosial Islami (Y1)	H2	-0,079	0,369	0,712	Tidak Signifikan
Tingkat Agresivitas Pajak (X3) → Tingkat Pelaporan Sosial Islami (Y1)	H3	0,374	3,493	0,001	Signifikan

Berdasarkan Tabel 5.8 dapat diketahui bahwa indeks maqashid syariah dan tingkat agresivitas pajak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pelaporan sosial Islami, sedangkan tingkat tata kelola Islami tidak berpengaruh terhadap tingkat pelaporan sosial Islami.

Sebelum menjelaskan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai jenis- jenis pengungkapan di dalam akuntansi yang meliputi pengungkapan wajib, pengungkapan sukarela, pengungkapan sosial, dan pengungkapan lingkungan.

#### 5.9 Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure)

Beberapa studi yang telah dilakukan untuk menguji dampak pengungkapan wajib terhadap variabel pasar modal dilakukan oleh Tsalavoutas and Dionysiou (2014), Aubert and Grudnitski (2011), Ghost and Lee (2013), Gelles, Howe and Xing (2011) dan Bonaime (2015). Dari beberapa studi tersebut, menunjukkan bahwa pengaruh pengungkapan wajib terhadap variabel pasar modal merupakan topik riset yang paling digunakan oleh para peneliti, sementara hanya studi Gelles, Howe and Xing (2011) yang menguji dampak beberapa variabel independen terhadap pengungkapan wajib.

Beberapa studi tersebut menghubungkan pengungkapan wajib dengan persyaratan pengungkapan berdasarkan standar IFRS diantaranya studi Tsalavoutas and Dionysiou (2014) dan Aubert and Grudnitski (2011). Dua studi terakhir ini akan dipaparkan terlebih dahulu baru selanjutnya studi-studi lainnya.

Tsalavoutas and Dionysiou (2014) menguji apakah kepatuhan pengungkapan wajib IFRS adalah value relevance, dengan menguji dampaknya pada nilai pasar (market value). Hasil studi ini menemukan bahwa pengungkapan wajib mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap nilai pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan wajib memberikan informasi yang relevan untuk partisipan pasar dan mempengaruhi keputusan investasi mereka. Tsalavoutas and Dionysiou (2014) menggunakan setting perusahaan yang ada di Yunani pada tahun 2005 yaitu tahun dimana pertama kali disyaratkannya penerapan IFRS di Yunani. Selain itu, studi ini menemukan bahwa value relevance dari informasi akuntansi pada perusahaan dengan level kepatuhan pengungkapan wajib yang tinggi adalah lebih besar secara signifikan dibandingkan pada perusahaan dengan level kepatuhan yang lebih rendah. Temuan studi Tsalavoutas and Dionysiou (2014) ini mengilustrasikan bahwa kepatuhan dengan persyaratan pengungkapan wajib IFRS menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan yang memitigasi ketidakpastian mengenai fundamental perusahaan.

Aubert and Grudnitski (2011) melakukan analisis dua tahap dengan mengkaji dampak dan pentingnya adopsi wajib standar pelaporan akuntansi internasional (IFRS) pada perusahaan- perusahaan Uni Eropa. Pada tahap pertama, ditentukan dampak dari adopsi wajib IFRS di 13 negara dan 20 industri. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan dalam ROA untuk perusahaan yang dihitung berdasarkan IFRS dan prinsip akuntansi lokal, yang berlaku umum (LG).

Perbedaan positif yang signifikan dapat dideteksi untuk perusahaan di Belgia, Finlandia, Perancis, Italia, Belanda, Swedia, Swiss dan Inggris. Hanya perusahaan Jerman dan Norwegia yang menghasilkan perbedaan rata-rata negatif yang signifikan antara ROA yang dihitung dengan menggunakan IFRS dan LG. Studi ini menemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara informasi akuntansi dan return pasar bagi perusahaan dalam

sampel pada semua negara dari 3.530 observasi, dan di negara Belgia, Finlandia, Perancis, Yunani, Italia, Belanda, Norwegia, Swedia dan Inggris. Dukungan untuk ketepatan waktu informasi akuntansi terungkap bagi perusahaan dalam sampel pada semua negara gabungan, dan di negara-negara Belgia, Finlandia, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, Swedia dan Swiss. Akhirnya, terdapat bukti yang mendukung dalil bahwa rezim akuntansi menghasilkan kualitas diskresioner akrual ditemukan untuk perusahaan-perusahaan dari sampel semua negara gabungan dari 3.480 pengamatan dan dari Finlandia, Yunani, Belanda, Swedia dan Inggris. Ketika membandingkan informasi akuntansi diferensial dibangun di bawah IFRS dan LG, beberapa perbedaan dapat ditemukan.

Beberapa studi lainnya seperti Gelles et al. (2011), Ghost & Lee Gelles (2013), dan Bonaime (2015) juga telah mengkonfirmasi adanya hubungan antara pengungkapan informasi akuntansi dengan nilai perusahaan dan pengendalian internal. Gelles, Howe and Xing (2011) menginvestigasi secara empiris bagaimana pengungkapan informasi earnings yang lebih awal mempengaruhi nilai perusahaan (firm value) pada akhir periode. Studi mereka menggunakan sampel yang relative besar sebanyak 33.798 firm-year observations dari tahun 1995-2004. Hasil studi mereka menemukan bahwa perusahaan lebih cenderung untuk melakukan pengungkapan lebih awal ketika mempunyai informasi earning negatif. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa pada akhir periode nilai perusahaan yang mengungkapkan adalah lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi earning lebih awal dan selanjutnya manfaat pengungkapan informasi lebih awal melebihi biaya-nya.

Ghost and Lee (2013) menghubungkan antara pengungkapan dengan pengendalian internal. Studi ini menemukan bahwa sebelum periode pengungkapan, perusahaan yang melaporkan kelemahan pengendalian internal (internal control) di bawah pengaturan Sarbanes–Oxley Act (SOX): (1) mempunyai masalah structural; (2) rentan dengan masalah pengendalian internal; dan (3) mempunyai kualitas pelaporan keuangan yang rendah. Selain itu, studi ini menemukan bukti langsung bahwa harga saham selama tahun-tahun sebelum pengungkapan memasukkan sejumlah besar informasi mengenai masalah structural, kemungkinan kelemahan pengendalian internal dan kualitas pelaporan yang rendah. Namun, studi ini menemukan bahwa banyak dari faktor yang value relevant ini tidak berhubungan dengan return periode pengumuman ketika perusahaan pada akhirnya mengungkapkan problem tersebut berdasarkan SOX dan terbatasnya informasi baru mengenai masalah structural dihasilkan pada sekitar tanggal ini. Hasil kami memberikan penjelasan yang menarik untuk diamnya reaksi harga saham di sekitar wajib tanggal pengungkapan.

Studi Bonaime (2015) ini membahas mengenai perubahan perilaku perusahaan pada sekitar tahun 2003 dimana pada tahun tersebut adanya modifikasi aturan SEC 10b-18, yang memerintahkan kepada perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan transaksi pembelian kembali (disclosure of repurchase transactions). Perusahaan mengumumkan lebih sedikit secara signifikan dan pasar terbuka sedikit lebih kecil rencana pembelian kembali dalam lingkungan pengungkapan yang meningkat. Namun, tingkat penyelesaian (jumlah pembelian kembali saham sebagai persentase dari jumlah yang diumumkan) secara signifikan meningkat. Strategi pengumuman yang lebih konservatif dan tingkat penyelesaian yang lebih agresif adalah konsisten dengan penurunan sinyal palsu (false signaling). Selanjutnya, pengumuman pembelian kembali pasar terbuka dipandang sebagai lebih kredibel, dalam lingkungan pengungkapan yang meningkat, setelah mengendalikan karakteristik perusahaan, cumulative abnormal announcement return (CAAR) adalah secara signifikan lebih besar pada periode pengungkapan yang tinggi. Hasil ini konsisten dengan perubahan signifikan dalam perilaku perusahaan di sekitar pengungkapan wajib yang baru (new mandatory disclosure).

Ringkasan beberapa riset sebelumnya mengenai pengungkapan wajib (mandatory disclosure) ditampilkan dalam peta riset pengungkapan wajib (Tabel 5.9).

Tabel 5.9. Peta Riset Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure)

No	Nama Peneliti	Tahun	Variabel independen	Variabel dependen	Model	Teori yang digunakan	Sampel
1	Aubert & Grudnitski	2011	EPS, SIGNEPS, INTEPS, and IFRS	Return	Ohlson (1995) and Wysocki (2005)		EU firms pada tahun 2005 pertama diterapkan kali adopsi IFRS, 3.350 observasi
			MD early				



			disclosure, control					
		2011	variables, year	Firm value				
			dummy, industry					
			dummy					
2	Gelles, Howe and Xing		firm size, firm age,		theory of myopic loss aversion (Benartzi and Thaler's (1995) and Teoh and Hwang (1991))	sampel akhir adalah 6.583 perusahaan dengan 33.798 year firm observation pada periode 1995-2004		
			EPS, liquidity, leverage, external					
			financing, lagged					
			ROA, institutional	disclosing				
			ownership,					
			intangible					
			assets/total assets,					
			Idiosyncratic					
			volatility, Year					
			dummies, and Industry dummies					
			mandatory		modified jones model (1991) and dechow et al. (1995)	sampel 672 perusahaan yang men-disclose kelemahan material dan beberapa sampel kontrol. Total sebagai 2.056 sampel pada periode 2003-2007		
		disclosure, kualitas						
		pelaporan						
3	Ghost and Lee	2013	keuangan, masalah struktural, ROA,	internal control				
			audit fee, size,					
			segment, audit					
			change, and age					

			mandatory				
			disclosure, net			teori sinyal	<b>sampel final 139</b>
<b>4</b>	Tsalavoutas & Dionysiou	2014	income, BE, gearing ratio,	nilai pasar	ohlson (1995)	dan teori pasar	<b>perusahaan di Yunani pada tahun 2005</b>
			auditor, size,			bebas	<b>2005</b>
			manufacturing				
<b>5</b>	<b>Bonaime</b>	<b>2015</b>	<b>mandatory disclosure, information asymmetry and monitoring</b>	<b>firm behavior</b>	<b>Heckman model, dividend propensity model</b>		<b>sampel final sebanyak 6.240 pengumuman repurchase</b>

### 5.10 Pengungkapan Sukarela

Beberapa studi telah dilakukan dengan menguji pengungkapan sukarela dan dampaknya pada variabel-variabel pasar modal diantaranya dilakukan oleh Cheng & Kin Lo (2006), Gordon, Loeb, & Sohail (2010), Dhaliwal et al. (2011), Bertomeu, Beyer and Dye (2011), Li & Zhuang (2012), Shroff et al. (2013), Belgacem & Omri (2014), Matsumura, Prakash, & Vera-Munoz (2014), Baginski, Clinton, & McGuire (2014), Trinkle, Crossler & Belanger (2015), Neuman, Omer, & Thompson (2015), dan Raymond, Dayanandan & Donker (2015). Kebanyakan dari studi tersebut menguji dampak pengungkapan sukarela terhadap variabel pasar modal seperti harga saham, biaya modal ekuitas, dan return. Hanya sedikit diantara studi yang menjadikan variabel pengungkapan sukarela sebagai variabel dependen, diantaranya studi Baginski, Clinton, & McGuire (2014) yang menguji dampak beberapa variabel independen terhadap disclosures per month (DPM). Selain itu, studi Neuman, Omer, & Thompson (2015) juga menguji dampak beberapa variabel independen terhadap misreport of voluntary disclosure.

Semua studi pengungkapan sukarela menggunakan metode archival kecuali studi Trinkle, Crossler & Belanger (2015) yang menggunakan metode eksperimen. Selain itu, kita dapat mengetahui bahwa beberapa studi menggunakan metode penilaian berbasis akuntansi sebagai ukuran biaya modal yang dikembangkan oleh Gebhardt et al. (2001), Claus and Thomas (2001) & Easton (2004). Untuk variabel pengungkapan sukarela beberapa riset menggunakan ukuran kualitas earnings yang diprosikan oleh nilai abnormal accrual dari model modified Jones (1991) dan Dechow et al. (1995). Beberapa teori yang digunakan sebagai dasar riset adalah teori keagenan (agency theory), teori perilaku (behavior theory), teori ekonomi (economic theory), dan teori pengungkapan sukarela (voluntary disclosure theory). Namun, ada yang menarik karena studi Trinkle, Crossler and Belanger (2015) menggunakan dasar teori psychometric dan herding theory karena studi mereka menggunakan metode eksperimen, berbeda dengan studi-studi lainnya yang menggunakan metode arsip (archival).

Studi Trinkle, Crossler & Belanger (2015) menggunakan sampel sebanyak 159 undergraduate dan partisipan tinggal di US dengan minimal usia 18 tahun. Teori dasar yang digunakan mereka adalah psychometric herding theory. Studi mereka menguji dampak pengungkapan sukarela terhadap perception of the news, valuation judgment, and perception of management's credibility. Studi Trinkle, Crossler & Belanger (2015) dilatarbelakangi bahwa Securities and Exchange Commission (SEC) baru-baru ini telah memperluas saluran komunikasi yang tersedia bagi manajemen ketika menentukan bahwa halaman media sosial pribadi dapat diakui sebagai saluran untuk pengungkapan keuangan. Namun, saluran media sosial lebih banyak tersedia untuk investor, baik non profesional dan canggih (sophisticated), dan memungkinkan untuk interaksi antara pengguna melalui posting dan komentar. Pendapat orang lain, seperti dinyatakan dalam komentar mereka di media sosial, dapat mempengaruhi persepsi investor dari berita dengan cara yang berada di luar itu pengungkapan tradisional oleh SEC. Studi mereka berupaya mengeksplorasi masalah ini dengan menguji pengaruh pengungkapan dan komentar terpasang melalui media sosial pada persepsi investor non profesional mengenai berita, penilaian valuasi, dan persepsi kredibilitas manajemen.

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa komentar yang di-share melalui media sosial mempengaruhi persepsi dan reaksi partisipan terhadap news.

Selain studi Trinkle, Crossler & Belanger (2015), studi-studi lainnya yang dilakukan oleh Cheng and Lo (2006), Dhaliwal et al. (2011), Bertomeu, Beyer and Dye (2011), Belgacem and Omri (2014) dan Raymond, Dayanandan & Donker (2015) menggunakan metode archival. Studi Cheng and Lo (2006) meng-hipotesis-kan bahwa insiders

memilih kebijakan pengungkapan strategis dan waktu perdagangan ekuitas mereka untuk memaksimalkan keuntungan perdagangan, tunduk pada biaya litigasi terkait dengan pengungkapan dan insider trading. Akuntansi untuk endogenitas antara pengungkapan dan perdagangan, Cheng and Lo (2006) menemukan bahwa ketika manajer berencana untuk membeli saham, mereka meningkatkan jumlah bad news forecasts untuk mengurangi harga pembelian. Selain itu, hubungan ini lebih kuat untuk perdagangan yang dimulai oleh chief executive officers daripada yang diprakarsai oleh eksekutif lainnya. Mengkonfirmasi perilaku strategis ini, studi ini menemukan bahwa manajer melakukan perdagangan mereka di sekitar bad news forecasts, membeli saham lebih sedikit terlebih dahulu. Sebaliknya, studi ini tidak menemukan bahwa manajer menyesuaikan aktivitas peramalan mereka ketika mereka menjual saham, konsisten dengan kekhawatiran litigasi yang lebih tinggi terkait dengan penjualan insider. Secara keseluruhan, hasil studi ini menunjukkan bahwa insiders mengeksploitasi peluang pengungkapan sukarela untuk keuntungan pribadi, tetapi hanya selektif, ketika risiko litigasi cukup rendah.

Studi Dhaliwal et al. (2011) menguji pengaruh potensial dari pengungkapan sukarela dalam mengurangi biaya modal ekuitas. Hasil studi mereka menemukan bahwa perusahaan dengan biaya modal ekuitas yang tinggi pada tahun sebelumnya cenderung melakukan pengungkapan kegiatan CSR pada tahun berjalan dan bahwa initiating firms dengan kinerja tanggung jawab sosial yang superior menikmati penurunan dalam biaya modal ekuitas. Selanjutnya, initiating firms dengan kinerja tanggung jawab sosial yang superior menarik investor institusi yang berdedikasi dan cakupan analisis yang lebih luas. Selain itu, analisis-analisis ini mencapai kesalahan dan dispersi forecast absolut yang lebih rendah. Studi ini pada akhirnya menemukan bahwa perusahaan yang mengeksploitasi manfaat dari biaya modal ekuitas yang lebih rendah sangat terkait dengan inisiasi pengungkapan CSR. Initiating firms lebih mungkin dibandingkan dengan perusahaan non-initiating firms dalam rangka meningkatkan modal ekuitas.

Studi Bertomeu, Beyer and Dye (2011) mengembangkan model pembiayaan yang bersama-sama menentukan struktur modal perusahaan, kebijakan pengungkapan sukarela, dan biaya modal.

Investor yang menerima sekuritas dalam return untuk memasok modal terkadang menimbulkan kerugian ketika mereka memperdagangkan surat berharga mereka dengan seorang pedagang informasi. Kebijakan pengungkapan perusahaan dan struktur efek menentukan keunggulan informasi dari pedagang informasi dan ukuran kerugian perdagangan investor dan biaya perusahaan modal. Studi ini membangun hirarki sekuritas optimal dan kebijakan pengungkapan yang bervariasi dengan volatilitas arus kas perusahaan. Meskipun model memprediksi hubungan negatif antara biaya modal perusahaan dan seberapa banyak informasi perusahaan diungkapkan, pengungkapan sukarela yang lebih mahal tidak menyebabkan biaya modal (cost of capital) perusahaan menurun.

Pengungkapan wajib mengubah pengungkapan sukarela perusahaan, pilihan struktur modal mereka, dan biaya modal mereka.

Studi Belgacem and Omri (2014) menggunakan setting investor domestic di Tunisia Stock Market. Studi keduanya dimotivasi oleh literature value relevant berbasis pasar di AS dan karena adanya pengembangan akuntansi dan pasar modal di Tunisia. Hasil studi mengindikasikan hubungan yang negative dan tidak signifikan antara pengungkapan sukarela dengan nilai perusahaan (firm value). Hasil yang tidak signifikan secara statistik ini mendukung gagasan bahwa ada interaksi kompleks dari faktor yang berbeda yang mempengaruhi hubungan ini. Namun, hasil studi mereka telah memberikan kontribusi bahwa penyelidikan dalam konteks pasar modal telah tumbuh di wilayah Afrika Utara. Studi yang lebih baru dilakukan oleh Raymond, Dayanandan & Donker (2015) yang hampir mirip dengan studi sebelumnya (Belgacem and Omri, 2014) yaitu sama-sama menggunakan variabel return sebagai variabel dependen. Studi mereka menguji apakah investor lebih bereaksi terhadap bad news pada good times dan kurang bereaksi terhadap bad news pada bad times.

Sampel studi adalah perusahaan yang menerbitkan pengungkapan sukarela. Studi ini menemukan bahwa reaksi harga segera untuk bad news (profit warning) adalah lebih kuat selama periode ekspansi (good times) daripada selama periode tekanan ekonomi (bad times). Tetapi, Raymond, Dayanandan & Donker (2015) menjelaskan bahwa reaksi investor adalah sensitif terhadap metodologi yang digunakan dan event window yang dipilih. Studi ini juga menemukan reaksi return saham kurang negatif selama pasca Sarbanes-Oxley Periode (SOX) dibandingkan dengan periode pra- SOX. Ringkasan hasil studi sebelumnya mengenai voluntary disclosure ditampilkan dalam peta riset pengungkapan sukarela (Tabel 5.10).

Tabel 5.10. Peta Riset Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure)

No	Peneliti	Tahun	Variabel independen	Variabel dependen	Model	Teori yang digunakan	Sampel
----	----------	-------	---------------------	-------------------	-------	----------------------	--------

1	Cheng & Kin Lo	2006	voluntary disclosure, size, growth, return, ROE, grants and ins_trade	Ins_trade	Lakonishok and Lee [2001]	behavior theory and agency theory	archieval, 27.792 ramalan penjualan yang dikeluarkan oleh 4.995 perusahaan dalam periode 1995-2002
2	Gordon, Loeb, & Sohail	2010	voluntary disclosure, EPS, BVPS, log of total assets and firm	stock price	(Barth et al. 2001)	Business Income	archieval, sampel 1.641 disclosing firm year dan 19.266 non disclosing firm year, periode 2000-2004
3	Dhaliwal et al.	2011	voluntary disclosure, hiperm, size, beta, lev, MB, LTG, LNDISP	cost of capital	Gebhardt et al. 2001, Claus and Thomas 001 & Easton 2004.	firm perspective	archieval, dengan sampel 213 disclosing firm pada periode 1993-2007
					Absolute value of abnormal accruals from the		
					modified Jones (1991) model, based on Dechow et al. (1995), to proxy for earnings quality		
					(Francis et al. 2008)		
4	Bertomeu, Beyer and Dye	2011	variable D dan U	voluntary disclosure	-	teori yang dikembangkan oleh Christensen et al. (2002)	tidak menggunakan sampel karena jenis studinya adalah literature review

5	Li & Zhuang	2012	voluntary disclosure, guidance, DA, volatility, PreCAR, Integer, Log(MB), officersize,	Underpricing	Model penilaian berbasis akuntansi sebagai ukuran biaya modal	Economic theory	archieval, sampel penawaran saham biasa 2.559 pada periode 1 Januari 1997 sampai dengan 31 Desember 2006
6	Shroff et al.	2013	voluntary disclosure, seofirm, SEO, postreform, seofirm, and control	Frequency	the modified Jones		archieval, mulai periode 2003-2008 dihasilkan sampel final sebanyak 792 kejadian SEO dan 792 non SEO firm
7	Belgacem & Omri	2014	voluntary disclosure, BOTS, ROA, size and market	Return	(Filip & Raffournier, 2010)	agency theory	archieval, sampel final adalah 20 perusahaan di Tunisia periode 2000 sampai 2008
8	Matsumura, Prakash, & Vera-Munoz	2014	voluntary disclosure, tco, assets, liab and opinc	MKT	(Heckman 1979; Maddala 1983)	Economic, voluntary disclosure	sampel adalah emisi karbon selama periode 2006-2008 untuk
			STRNG, CNCRN, PROPDISCL, Size, MF, BM,	DISC_CDP			S&P 500 firms
			Leverage, FRNSALE, DISC_CDP, EPA				
9	Baginski, Clinton, & McGuire	2014	analfol, IncShares, size, InstOwn, MrgOwn, EPS, BTM, performance, return, industry fixed effects	disclosures per month (DPM)	Heckman (1979)		sampel adalah perusahaan yang antara tahun 1994 dan 1999 sebanyak 128 perusahaan yang menerbitkan

							<b>1.419 forward-lookig disclosure</b>
<b>10</b>	Trinkle, Crossler & Belanger	2015	voluntary disclosure	perception of the news, valuation judgment, and perception of management's credibility		Psychometric, herding theory	<b>metode eksperimen dengan sampel 159 undergraduate, partisipan tinggal di US minimal usia 18 tahun</b>
<b>11</b>	Neuman, Omer, & Thompson	2015	non_auditor, self_prepare, availability, distance, tax planning, control, industry and year	Misreport	Petrovits et al. (2011) and Belsley, Kuh, and Welsch (1980)	proximity and knowledge availability	<b>sampel adalah 940 organisasi NPF antara 2004 dan 2008</b>
<b>12</b>	Raymond,	2015	BC, SOX, RFD,	cumulative	Hamilton	teori yang	<b>sampel sebanyak</b>
	Dayanandan		size, ROA, LEV,	abnormal	(1989) and	berhubungan	<b>445 perusahaan</b>
	<b>&amp; Donker</b>		<b>MTB, Cash, and Ind</b>	<b>average return (CAAR)</b>	<b>David (1997)</b>	<b>dengan market response to announcement t</b>	<b>US yang menerbitkan pengungkapan sukarela pada periode 1995 sampai 2009</b>

### 5.11 Pengungkapan Sosial dan Pengungkapan Lingkungan

Beberapa studi telah menguji secara khusus pengungkapan social, pengungkapan lingkungan dan pengungkapan sukarela lainnya dan dampaknya terhadap variabel-variabel pasar modal diantaranya yang dilakukan oleh Griffin and Sun (2013), Xu and Zhang (2013), Husser and Bardiet (2014), dan Mangena, Li and Tauringan (2016). Topik-topik yang diteliti oleh para peneliti tersebut menyangkut topik pengungkapan social, pengungkapan politik, peranan informasi Wikipedia, pengungkapan lingkungan dan pengungkapan modal intelektual.

Dari beberapa studi tersebut, seluruhnya menggunakan metode archieival dengan memanfaatkan data sekunder. Selain itu, dasar teori yang digunakan untuk mengembangkan hipotesis penelitian diantaranya teori stakeholder, teori pengungkapan sukarela, teori biaya informasi dan teori legitimasi. Sementara dilihat dari model yang digunakan, tetap menggunakan model Ohlson (1995) dan model lainnya seperti model PEG dari Easton (2004). Variabel disclosure dari beberapa studi tersebut dijadikan sebagai variabel dependen seperti dalam studi Griffin and Sun (2013) dan Xu and Zhang (2013), sementara studi lainnya Husser and Bardinet (2014) menguji pelaporan lingkungan dan pelaporan social dan dampaknya terhadap nilai pasar ekuitas dan MBR. Studi Mangena, Li and Tauringana (2016) menguji pengaruh pengungkapan keuangan dan pengungkapan modal ekuitas terhadap biaya modal ekuitas.

Studi Mangena, Li and Tauringana (2016) menemukan hubungan negative antara pengungkapan modal intelektual dan biaya modal ekuitas. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa hubungan antara pengungkapan keuangan dan biaya modal ekuitas menjadi meningkat ketika dikombinasikan dengan pengungkapan modal intelektual. Studi ini juga menunjukkan adanya interaksi pengungkapan modal intelektual dan pengungkapan keuangan dalam membentuk pengaruh keduanya pada biaya modal ekuitas. Selain studi Mangena, Li and Tauringana (2016), studi Husser and Bardinnet (2014) juga menguji dampak pengungkapan terutama pengungkapan social dan pengungkapan lingkungan terhadap nilai pasar ekuitas dan MTB. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa investor mengukur kinerja jangka pendek perusahaan dengan menggunakan informasi mengenai kualitas manajemen lingkungan perusahaan. Selain itu, pengungkapan social perusahaan yang berhubungan dengan kualitas manajemen tenaga kerja mempengaruhi kinerja jangka pendek dan jangka panjang perusahaan.

Berbeda dengan dua studi sebelumnya (Mangena, Li and Tauringana, 2016) dan Husser and Bardinnet, 2014), studi Griffin and Sun (2013) menguji dampak beberapa independen terhadap intensitas pengungkapan CSR. Hasil studi Griffin and Sun (2013) menunjukkan adanya asosiasi yang reliable antara pengungkapan sukarela CSR dan kepentingan politik perusahaan. Studi keduanya juga menunjukkan asosiasi positif antara kontribusi politik perusahaan dan excess stock return. Strategi portfolio investasi yang didasarkan pada ukuran perusahaan, intensitas pengungkapan CSR dan kontribusi politik perusahaan menghasilkan rata-rata excess stock return yang positif dan signifikan. Di samping itu, studi Xu and Zhang (2013) menemukan bahwa pada sisi penawaran informasi, agregasi informasi pada Wikipedia dapat memoderasi timing pengungkapan sukarela oleh manajer tentang bad news. Sebaliknya pada sisi permintaan informasi, studi ini menemukan bahwa agregasi informasi Wikipedia memoderasi reaksi negative investor terhadap bad news. Ringkasan beberapa studi yang berhubungan dengan pengungkapan sosial, pengungkapan sukarela lainnya dan variabel- variabel pasar modal dipaparkan dalam peta riset pengungkapan social dan lingkungan (Tabel 5.11).

Tabel 5.11 Peta Riset Pengungkapan Sosial dan Lingkungan (social and environment disclosure)

No	Nama Peneliti	Tahun	Variabel independen	Variabel dependen	Model	Teori yang digunakan	Sampel
1	Griffin and Sun	2013	political, ongoing implicit claims and other company characteristics	Intensitas disclosure CSR		voluntary disclosure theory, stakeholder theory and the theory espoused by Cooper et al. (2010)	<b>a final sample of a maximum of 4,781 CSR observations representing 784 CRSP/Compustat companies and 1,683 company-years (January 2000 to December 2011)</b>
2	Xu and Zhang	2013	Quantified informatin (dispersion and bias), the role of Wikipedia's information  Aggregation and control variables (number of news articles and the amount of newsworthy content)	timing of voluntary disclosure (disclosure lag)	A seminal model, Dye's (1985) model, Classical assetpricing  Models and Diamond and	-	<b>We manually search the Lexis- Nexis database for news articles about each of the 375 companies in our final sample.</b>

					Verrecchia's (1981) model		
3	Husser and Bardinet	2014	Book value per share, Earnings/book value, EPS, Environmental Reporting Score, Social Reporting Score, Global Reporting Score and control variable	Market value of equity per share and market to book	the modified Ohlson model (1995) and the market to book model.	The stakeholders Theory, theory of information costs, and legitimacy theory	<b>Sampel final 103 perusahaan untuk tahun 2008 (perusahaan Prancis yang terdaftar di NYSE Euronext SBF 120 index</b>
4	Mangena, Li and Tauringana	2016	financial and IC disclosure, and control variables: natural log of firm size (LnSIZE), market	the cost of equity capital	the modified price-earnings growth (PEG) model	-	<b>Using data for a sample of 125 U.K. firms (all firms listed on the LSE as at March 31, 2008)</b>
			<b>risk (BETA), financial leverage (LEV), and natural log of book-to-market ratio (LnB2M)</b>		<b>(Easton, 2004)</b>		

### 5.12 Pengaruh Indeks Maqashid Syariah terhadap Tingkat Pelaporan Sosial Islami

Teori legitimasi merupakan teori dasar untuk menjelaskan hubungan antara indeks maqashid syariah dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam teori legitimasi, dikenal dengan adanya kontrak sosial. Agar perusahaan dapat diterima oleh masyarakat maka perusahaan harus memenuhi kontrak sosial dengan masyarakat melalui pengungkapan yang berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial, dan politik (Hogner, 1982; Lehman, 1983; Lindblom, 1983). Berdasarkan teori legitimasi tersebut, bank syariah harus mengungkapkan lebih banyak informasi tentang tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa semakin tinggi indeks maqashid syariah seharusnya berdampak pada semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Aldrich & Fiol (1994) serta Suchman (1995) mengungkapkan bahwa legitimasi sosio-politik mengacu pada ciri, atribut, dan hasil organisasi terhadap norma sosial dapat diterima atau tidak. Sesuai dengan Aldrich & Fiol (1994) serta Suchman (1995), indeks maqashid syariah sebagai ukuran hasil kinerja bank syariah seharusnya berkontribusi pada peningkatan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dari bank syariah.

Hasil penelitian saat ini mengkonfirmasi teori dan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil penelitian berhasil menemukan pengaruh indeks maqashid syariah terhadap tingkat pelaporan sosial Islami. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil mengkonfirmasi peranan teori legitimasi dalam menjelaskan hubungan antara indeks maqashid syariah dan tingkat pelaporan sosial Islami. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan



mengenai hasil penelitian ini terutama dari sisi data yang terkait dengan indeks maqashid syariah dan hasil penelitian empiris sebelumnya.

*Pertama*, dari sisi data biaya pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu 7 tahun (2010-2016). Berdasarkan hasil analisis deskriptif sebelumnya, biaya pendidikan dan pelatihan di bank syariah masih cukup baik dengan rata-rata sebesar 1,1% selama periode 2010-2016. Rasio terbesar diperoleh pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,48%, sedangkan rasio terendah diperoleh pada tahun 2012 sebesar 0,84% dan tahun 2016 sebesar 0,86%. Namun terdapat satu bank syariah yang tidak menyajikan informasi biaya pendidikan di laporan keuangan (*financial statement*) dan laporan tahunan (*annual report*) selama periode 2010-2016 yaitu Bank Jabar Banten Syariah (BJBS).

*Kedua*, dari sisi data biaya penelitian dan pengembangan selama kurun waktu 7 tahun (2010-2016). Berdasarkan data biaya penelitian dan pengembangan, meskipun rata-rata rasio beban penelitian dan pengembangan dibagi total biaya selama periode 2010-2016 adalah relatif rendah sebesar 0,2%, sesungguhnya terjadi peningkatan rasio dari periode 2010-2012 ke 2013-2016. Biaya penelitian dan pengembangan pada periode 2010-2012 hanya sebesar 0,05% dan mengalami kenaikan pada periode 2013-2016 menjadi sebesar 0,32%. Dari sebelas bank syariah, terdapat dua bank Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang secara konsisten membebaskan dan menyajikan beban penelitian dan pengembangan dalam laporan keuangan (*financial statement*) dan laporan tahunan (*annual report*) pada periode 2010-2016. Selain kedua bank Syariah tersebut, Bank Syariah Bukopin menyajikan beban penelitian dan pengembangan pada periode 2010-2013, sedangkan Bank Victoria Syariah menyajikan beban penelitian dan pengembangan pada periode 2013-2016.

*Ketiga*, dari sisi data biaya promosi selama kurun waktu 7 tahun (2010-2016). Aspek promosi berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk dan jasa yang ada di bank syariah. Dibandingkan dengan biaya-biaya sebelumnya, biaya promosi mencapai angka yang lebih besar yaitu 2,19% pada periode 2010-2016. Namun berbeda dengan biaya penelitian dan pengembangan, sebagian besar bank syariah telah menyajikan informasi biaya promosi di dalam laporan keuangan (*financial statement*) dan laporan tahunan (*annual report*) kecuali Bank Victoria Syariah dan Maybank Syariah. Kedua bank syariah (Bank Victoria Syariah dan Maybank Syariah) tidak menyajikan biaya promosi pada periode 2010-2012. Seluruh bank syariah melakukan pengungkapan biaya promosi sejak tahun 2013 sehingga rasio rata-rata biaya promosi dibagi total biaya pada periode 2013-2016 meningkat menjadi 2,23% dibandingkan periode sebelumnya 2010-2012 sebesar 2%. Hal inilah yang menunjukkan terdapat indikasi peningkatan dalam penyajian biaya promosi pada laporan keuangan bank syariah pada periode penelitian.

*Keempat*, dari sisi hasil penelitian empiris sebelumnya. Hasil penelitian saat ini mendukung studi sebelumnya yang dilakukan Othman dkk. (2009), dimana Othman dkk. (2009) berhasil membuktikan secara empiris pengaruh kinerja perusahaan terhadap tingkat pelaporan sosial Islami. Semakin baik kinerja perusahaan berdampak pada semakin luas tingkat pengungkapan pelaporan sosial Islami. Studi Othman dkk. (2009) mendukung studi sebelumnya dari Deegan (2002) yang menemukan bahwa perusahaan yang berkinerja baik cenderung melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada tingkat yang lebih luas/tinggi dalam rangka memperoleh legitimasi dari masyarakat sehingga tetap dapat mempertahankan kinerjanya di masa depan. Sebaliknya hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi sebelumnya yang dilakukan Hossain dkk. (2006) serta Sunarsih & Ferdiansyah (2017), dimana kedua studi tersebut tidak berhasil membuktikan pengaruh kinerja perusahaan terhadap tingkat pelaporan sosial Islami.

### 5.13 Pengaruh Tingkat Tata Kelola Islami terhadap Tingkat Pelaporan Sosial Islami

Hubungan tata kelola dan pengungkapan tanggung jawab sosial secara umum dijelaskan dalam kerangka teori legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan hubungan antara tingkat tata kelola Islami dan tingkat pengungkapan pelaporan sosial. Agar mendapatkan penerimaan dan pengesahan dari masyarakat, maka perusahaan perlu melakukan tindakan yang sesuai dengan sistem norma, nilai, dan kepercayaan masyarakat. Dalam hal tindakan untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial merupakan tindakan yang sesuai dengan sistem norma, nilai, dan kepercayaan masyarakat. Demikian pula, hubungan antar kedua variabel ini dijelaskan oleh Indrawaty & Wardayati (2015) dimana keduanya menjelaskan bahwa efektifitas dari *Islamic corporate governance* ditunjukkan oleh pelaporan sosial Islami (*Islamic social reporting*). Perusahaan yang menjalankan tata kelola yang baik akan menerapkan pengungkapan pelaporan sosial Islami tingkat yang lebih luas.

Untuk variabel tingkat tata kelola Islami dikatakan bahwa semakin tinggi skor tingkat tata kelola Islami menunjukkan implementasi tata kelola Islami yang kurang baik dan sebaliknya semakin rendah skor tingkat tata kelola Islami menunjukkan pelaksanaan tata kelola Islami yang lebih baik. Hasil penelitian ini menunjukkan arah yang negatif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik implementasi tata kelola Islami yang dijalankan bank syariah, semakin banyak pengungkapan pelaporan sosial Islami. Sebaliknya, semakin kurang baik implementasi tata kelola Islami bank syariah, semakin sedikit informasi tanggung jawab sosial Islami yang diungkapkan bank syariah. Hasil penelitian saat ini berhasil mengkonfirmasi teori legitimasi.

Hasil penelitian juga tidak berhasil menemukan pengaruh tata kelola terhadap pelaporan sosial Islami. Semakin baik tingkat tata kelola Islami yang dilakukan bank syariah, ternyata tidak berdampak pada luas atau jumlah pelaporan sosial Islami yang diungkapkan bank syariah.

Salah satu indikator tingkat tata kelola Islami adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Hasil penelitian ini tidak menemukan pengaruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap luasnya pengungkapan pelaporan sosial Islami. Berdasarkan analisis deskriptif data, informasi yang paling banyak diungkapkan oleh bank syariah adalah pengungkapan informasi tentang tata kelola, masyarakat, dan tenaga kerja yang meliputi: informasi mengenai status kepatuhan syariah dan aktivitas yang diharamkan; informasi mengenai sadaqah, wakaf, dana kebajikan; informasi mengenai pekerjaan, pendidikan dan pelatihan karyawan, keterlibatan karyawan, dan lingkungan kerja. Hasil penelitian ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang dilakukan Sembiring (2006); Nurkhin (2010); Badjuri (2011); serta Wiyuda & Pramono (2017) dalam kaitannya dengan hubungan dewan komisaris dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris berdampak pada pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Penelitian saat ini tidak menggunakan ukuran jumlah tetapi menggunakan skor *self assessment* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Sembiring (2006) menemukan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Nurkhin (2010) membuktikan bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Wiyuda & Pramono (2017) menemukan pengaruh positif dari dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Badjuri (2011) membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak mempengaruhi luasnya pengungkapan pelaporan sosial Islami. Diantara indikator tingkat tata kelola Islami, indikator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi memperoleh skor rata-rata yang tinggi yang menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab Direksi telah dijalankan dengan baik. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Othman dkk. (2009) dan Sunarto (2016). Othman dkk. (2009) menemukan bahwa komposisi dewan direksi muslim dan non-muslim mempengaruhi perusahaan untuk menyediakan pelaporan sosial Islami. Sunarto (2016) berhasil menemukan pengaruh positif jumlah anggota direksi terhadap pengungkapan pelaporan sosial Islami. Semakin banyak jumlah anggota direksi berbanding lurus dengan luas pengungkapan pelaporan sosial Islami.

Indikator ketiga dari tingkat tata kelola Islami adalah kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Semakin lengkap dan baik pelaksanaan tugas komite ternyata tidak terbukti mempengaruhi luas pengungkapan pelaporan sosial Islami. Hasil penelitian ini tidak mendukung studi Barako dkk. (2006) yang menemukan bahwa kehadiran komite audit merupakan faktor penting yang dapat diasosiasikan dengan tingkat pengungkapan sukarela. Sebaliknya, hasil penelitian ini mendukung studi yang dilakukan Badjuri (2011) dan Wiyuda & Pramono (2017). Badjuri (2011) tidak menemukan pengaruh komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Wiyuda & Pramono (2017) membuktikan bahwa komite audit memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Salah satu organ penting di bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional adalah dewan pengawas syariah (DPS). Hasil pengujian validitas konvergen menunjukkan bahwa indikator yang berkaitan dengan dewan pengawas syariah (indikator keempat) adalah valid. Studi sebelumnya dilakukan Farook & Lanis (2005); Dienes & Velte (2016); serta Sunarto (2016) yang menguji secara langsung pengaruh dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan hasil yang berbeda satu sama lain. Hasil penelitian saat ini berbeda dengan beberapa studi sebelumnya yang berhasil membuktikan pengaruh dewan pengawas syariah terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya Farook & Lanis (2005); Sunarto (2016). Sebaliknya, hasil studi ini mendukung Dienes & Velte (2016) yang tidak memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh keahlian, frekuensi pertemuan, dan ukuran dewan pengawas syariah (DPS) terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Studi tersebut menggunakan objek penelitian pada bank syariah di Jerman.

#### 5.14 Pengaruh Tingkat Agresivitas Pajak terhadap Tingkat Pelaporan Sosial Islami

Pengaruh tingkat agresivitas pajak terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijelaskan dalam konteks teori legitimasi. Agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat, maka perusahaan yang agresif akan berupaya mengungkapkan lebih banyak informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian saat ini berhasil menemukan pengaruh tingkat agresivitas pajak terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini berhasil mengkonfirmasi peranan teori legitimasi dalam menjelaskan pengaruh tingkat agresivitas pajak terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terutama pada objek penelitian bank syariah di Indonesia pada periode 2010-2016.

Hasil penelitian saat ini mendukung studi-studi sebelumnya yang dilakukan Deegan dkk. (2002); Lanis & Richardson (2013); serta Zeng (2016). Studi mereka seluruhnya berhasil membuktikan secara empiris pengaruh

tingkat agresivitas pajak terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus mampu mengkonfirmasi peranan teori legitimasi untuk menjelaskan hubungan antara tingkat agresivitas pajak dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Studi Deegan dkk. (2002) menemukan pengaruh positif tingkat agresivitas pajak terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam arti semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan maka semakin maksimal pula tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Apabila Lanis & Richardson (2013) membandingkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan antara perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dengan perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak, penelitian saat ini tidak melakukan perbandingan antara kedua jenis perusahaan tetapi melakukan pengujian pengaruh tingkat agresivitas pajak terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

## Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, dapat ditarik beberapa simpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pada variabel indeks maqashid syariah, hanya indikator mendidik individu yang valid dan digunakan dalam analisis data, sedangkan dua indikator lainnya yaitu membangun keadilan dan kepentingan publik tidak memenuhi validitas konvergen.
2. Pada variabel tingkat tata kelola Islami, seluruh indikator memenuhi validitas konvergen, kecuali indikator kesembilan yaitu penerapan fungsi audit ekstern. Adapun kesepuluh indikator lainnya memenuhi validitas konvergen yang meliputi: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan Bank, penerapan fungsi audit intern, Batas Maksimum Penyaluran Dana, serta transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.
3. Pada variabel tingkat pelaporan sosial Islami, dari enam indikator terdapat dua indikator yang memenuhi validitas konvergen yaitu *finance & investment* serta *corporate governance*, sedangkan empat indikator lainnya yaitu *products, employee, society, dan environment*.
4. Model pengukuran telah memenuhi uji validitas diskriminan. Hasil pengujian validitas diskriminan menunjukkan bahwa semua variabel memiliki korelasi tertinggi pada variabel itu sendiri dibandingkan dengan korelasi pada variabel lainnya.
5. Seluruh variabel dalam model pengukuran memiliki reliabilitas yang baik, yang ditunjukkan dengan skor *cronbach alpha* dan *composite reliability* lebih dari 0,70.
6. Pada variabel tingkat tata kelola Islami, indikator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dan indikator pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa termasuk indikator yang paling dominan dalam mengukur variabel tata kelola Islami dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya.
7. Rendahnya rasio biaya pendidikan dan pelatihan selama periode penelitian (2010-2016) dan bahkan rasio terendah terjadi pada akhir periode penelitian (2016) yang menunjukkan kecenderungan terjadinya penurunan. Hal ini menunjukkan bank syariah di Indonesia belum menempatkan biaya pendidikan dan pelatihan pada porsi yang besar dalam biaya usahanya.
8. Rendahnya rasio biaya penelitian dan pengembangan dibagi total biaya selama periode penelitian disebabkan karena sebagian bank syariah tidak menyajikan biaya penelitian dan pengembangan sebagai salah satu pos biaya dalam laporan keuangan dan laporan tahunan. Namun demikian, terdapat peningkatan rasio tersebut pada periode 2013-2016 yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya (2010-2012).
9. Rata-rata biaya promosi selama periode penelitian menunjukkan hasil yang cukup baik dan terdapat kecenderungan yang baik bahwa sebagian besar bank syariah telah menyajikan informasi biaya promosi dalam laporan keuangan dan laporan tahunan.
10. Hasil penelitian saat ini mengkonfirmasi teori dan konsep mengenai pengaruh indeks maqashid syariah terhadap tingkat pelaporan sosial Islami. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil mengkonfirmasi peranan teori legitimasi dalam menjelaskan hubungan antara indeks maqashid syariah dan tingkat pelaporan sosial Islami.
11. Tingkat tata kelola Islami berpengaruh terhadap tingkat pelaporan sosial Islami. Arah hubungan adalah positif menunjukkan bahwa semakin baik implementasi tata kelola Islami bank syariah syariah dapat berdampak pada meningkatnya pengungkapan pelaporan sosial Islami. Temuan ini berhasil mengkonfirmasi peran teori keagenan dan teori legitimasi dalam menjelaskan pengaruh tata kelola terhadap tingkat pelaporan sosial Islami.
12. Hasil penelitian tidak berhasil menemukan pengaruh tata kelola terhadap pelaporan sosial Islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik tingkat tata kelola Islami yang dilakukan bank syariah, ternyata

tidak berdampak pada luas atau jumlah pelaporan sosial Islami yang diungkapkan bank syariah.

13. Hasil penelitian berhasil menemukan pengaruh tingkat agresivitas pajak terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan peranan teori legitimasi dalam menjelaskan pengaruh tingkat agresivitas pajak terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terkonfirmasi.

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan penelitian, dapat diusulkan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dan implikasi praktis bagi bank Syariah.

### Saran bagi Bank Umum Syariah

1. Berdasarkan statistik deskriptif ditemukan beberapa bank syariah tidak menyajikan informasi yang berkaitan dengan biaya pendidikan, biaya penelitian, biaya pelatihan, dan biaya promosi di dalam laporan keuangan dan laporan tahunan. Pada sisi lain, biaya-biaya tersebut merupakan aspek penting dalam pengukuran indeks maqashid Syariah. Kondisi ini akan menyulitkan para peneliti yang akan meneliti indeks maqashid syariah sebagai upaya peningkatan dan perbaikan kinerja perbankan syariah.
2. Temuan masalah yang pertama tersebut, secara tidak langsung mengindikasikan kurangnya upaya serius bank syariah dalam mengembangkan nilai-nilai spiritual bagi pegawai, meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai, serta menyediakan informasi kepada *stakeholder* mengenai produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah seharusnya melakukan penyajian dan pengungkapan informasi biaya pendidikan, penelitian, pelatihan, dan biaya publikasi secara memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
3. Berdasarkan statistik deskriptif ditemukan adanya beberapa bank syariah yang tidak melakukan pembayaran zakat dan sekaligus tidak melakukan penyajian laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagaimana dapat dilihat pada laporan tahunan bank syariah. Dalam konteks ini, zakat sebagaimana pajak sama-sama merupakan kewajiban setiap individu dan sekaligus badan. Hanya terdapat perbedaan dimana zakat merupakan kewajiban agama sedangkan pajak adalah kewajiban negara. Dalam konteks ini, penelitian ini menyarankan agar bank syariah melakukan penyajian laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian yang diharapkan agar bank syariah berkontribusi dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

### Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Pada indikator tata kelola Islami, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan indikator lain untuk mengukur tingkat tata kelola Islami, misalnya dengan memasukkan keberadaan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), jumlah anggota DPS, keberadaan lintas anggota DPS, kualifikasi doktor bagi anggota DPS, dan reputasi anggota DPS sebagaimana studi sebelumnya yang dilakukan Farook dan Lanis (2005) serta Farook dkk. (2011).
2. Pada indikator indeks maqashid syariah, dapat dikembangkan indikator baru yang mampu mengakomodasi konsep maqashid syariah di Indonesia, di luar indikator yang sudah dibuat peneliti sebelumnya yang mayoritasnya dari Malaysia. Perlu dikembangkan indikator indeks maqashid syariah tersendiri dan khas Indonesia yang lebih mencerminkan laporan keuangan dan laporan tahunan bank syariah di Indonesia.
3. Pada indikator *Islamic social reporting*, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan indikator lain untuk mengukur tingkat pelaporan sosial Islami, misalnya indikator yang dibuat Haniffa (2002). Indikator menurut Haniffa (2002) terdiri dari: *finance and investment, products/services, employee, society, dan environment*.
4. Pada sisi objek penelitian, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan objek entitas Syariah lain di luar perbankan Syariah misalnya asuransi Syariah. Selain itu, dapat pula menggunakan entitas syariah non lembaga keuangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), *Jakarta Islamic Index (JII)*, *Baitul Mal wat Tamlik (BMT)*, dan entitas syariah lainnya.

D. **STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas

mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran

Pada tahun kedua, luaran wajib adalah buku referensi yang telah diterbitkan Penerbit Mitra Wacana Media (MWM) yang bertempat kedudukan di Bogor dan telah terdaftar di IKAPI.. Selain itu, luaran tambahan dari penelitian tahun kedua adalah artikel hasil penelitian yang telah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional yaitu *International Virtual Conference on Interdisciplinary Research in Higher Education*, 1-2 Oktober 2020, yang diselenggarakan *International Association of Scholarly Publishers, Editors & Reviewers Inc.* yang berkantor pusat di Filipina. Pada saat laporan akhir ini selesai dibuat, luaran wajib dan luaran tambahan telah tercapai.

**E. PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian mitra

Dalam Skema Hibah Penelitian Dasar, tidak memerlukan peran mitra berupa kerjasama dan kontribusi mitra.

**F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Selama proses penelitian, tidak ada kendala atau hambatan yang berarti yang mempersulit hasil penelitian, karena hasil penelitian merupakan kajian teoritis dan hasil penelitian empiris sebelumnya. Selain itu, tidak terdapat kendala atau hambatan dalam mencapai luaran yang telah dijanjikan, karena peneliti telah beberapa kali melakukan proses penerbitan buku ajar sehingga tidak mengalami kesulitan dalam proses penyusunan buku referensi dan mencari penerbit yang akan menerbitkan naskah buku referensi. Penerbit Mitra Wacana Media (berlokasi di Bogor) dipilih karena termasuk penerbit buku nasional dan telah terdaftar resmi di Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), dimana sebelumnya pada tahun 2019, peneliti telah menerbitkan buku ajar dengan judul "Pengantar Perpajakan: Cara untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak.

**G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN:** Tuliskan dan uraikan rencana tindak lanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Rencana penelitian selama 2 tahun periode 2019-2020 telah selesai dilakukan dan luaran penelitian telah tercapai sehingga tidak terdapat rencana tindak lanjut penelitian pada skema Penelitian Dasar ini. Peneliti telah melanjutkan dengan Skema Penelitian Terapan untuk mengembangkan penelitian dasar ini, yang telah mengajukan Proposal Hibah Penelitian Terapan untuk Periode 2021-2022.

**H. DAFTAR PUSTAKA:** Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Abdulhaq, A. S., & Muhamed, N. A. (2015). Extent of Corporate Social Responsibility Disclosure and Its Determinants: Evidence from Kingdom of Saudia Arabia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law*, 7(1), 40-47.

Abu Zahrah, M. (1997), *Usul al-Fiqh*, Cairo, Dar al-Fikr al-.,Arab

Al-Ajmi, M., Al-Mutairi, A., & Al-Duwaila, N. (2015). Corporate Social Disclosure Practices in Kuwait. *International Journal of Economics and Finance*, 7(9), 244-254.

Alarussi, A. S., Hanefah, M. M., & Selamat, M. H. (2009). Internet Financial and environmental Disclosures by Malaysian Companies. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 3(1), 3-25.

Aldrich, H. E., & Fiol, C. M. (1994). Fools rush in? The Institutional context of industry creation. *Academy of Management Review*, 19(4), 645-670.

- Al-Raysuni, A. (2005). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objective and Intents of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Ariyabandu, M. M., & Hulangamuwa, P. (2002). Corporate Social Responsibility and Natural Disaster Reduction in Sri Lanka.
- Arkolakis, C. (2010). Market penetration costs and the new consumers margin in international trade. *Journal of Political Economy*, 118(6), 1261-1263.
- Ashur, I. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Azheri, B. (2011). *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Badjuri, A. (2011). Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme *Corporate Governance*, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Manufaktur dan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 38-54.
- Barron, D. N. (1998). Pathways to legitimacy among consumer loan providers in New York City, 1914-1934. *Organization Science*, 19(2), 207-233.
- Baydoun, N., & Willet, R. (2000). Islamic Corporate Reports. *ABACUS*, 36(1): 71-90.
- Belkaoui, A., & Karpik, P. G. (1989). "Determinants of the Corporate Decision to disclose Social Information", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 2(1), 36-51.
- Berete, M. (2011). Relationship between corporate social responsibility and financial performance in the pharmaceutical industry. *Dissertation Abstracts International: Section A. Humanities and Social Sciences*, 72(08). (UMI No. 3457470)
- Bitektine, A. (2011). Toward a Theory of Social Judgments of Organizations: The Case of Legitimacy, Reputation, and Status. *Academy of Management Review*, 36, 151-179.
- Brammer, S., & Pavelin, S. (2008). Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure. *Business Strategy and the Environment*, 17(2), 120-136.
- Campbell, J. L. (2007). Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility. *Academy of Management Review*, 32(3), 946-967.
- Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. *Academy of Management Review*, 4(4), 497-505.
- \_\_\_\_\_. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39-48.
- Chapra, M. Umer, (1985), *Towards a Just Monetary System*, Leicester, The Islamic Foundation.
- Chrisman, J. J., Chua, J. H., Kellermans, F. W., & Chang, E. P. (2007). Are family managers agents or stewards? An exploratory study in privately held family firms. *Journal of Business Research*, 60(10), 1030-1038.
- Christopher, T., & Filipovic, M. (2008). The extent and determinants of disclosure of Global Reporting Initiative Guidelines: Australian evidence, *The Journal of Contemporary Issue in Business and Government*, 14(2), 17-40.
- Collis, J., Hussey, R., Crowther, D., Lancaster, G., Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Bryman, A., Bell, E., & Gill, J. (2003). *Business research methods*. Palgrave Macmillan, New York.
- Corbetta, G., & Salvato, C. (2004). Self-serving or self-actualizing? Models of man and agency costs in different types of family firms: A commentary on "Comparing the Agency Costs of Family and Non-family Firms: Conceptual Issues and Exploratory Evidence". *Entrepreneurship Theory and Practice*, 28(4), 355-362.
- Cormier, D., Ledoux, M., & Magnan, M. (2011), 'The informational contribution of social and environmental disclosures for investors', *Management Decision*, Vol. 49, No. 8, pp. 1276-1304.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, R. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47.
- Deegan, C., Rankin, M., & Tobin J. (2002). An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosures of BHP from 1983-1997: A Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 15(3), 312 - 343.

- Dhaliwal, D., Li, O.Z., Tsang, A., & Yang, Y.G. (2011). Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: the initiation of corporate social responsibility reporting. *Accounting Review*, 86(1), 59-100.
- Dhanani, S., & Solanji, K. (2011). R & D tax credit: direct benefits to small & mid-market companies. Business View. <http://www-view.com/finance/r-d-tax-credit-direct-benefits-to-small-mid-market-companies.htm>
- Dienes, D., & Velte, P. (2016). The Impact of Supervisory Board Composition on CSR Reporting: Evidence from the German Two-Tier System. *Sustainability*, 8(63), 1-20.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Esen, M. Fevzi. (2015). A Statistical Framework on Identification of Maqasid Al-Shariah Variables for Socio-Economic Development Index. *Journal of Business Studies Quarterly*, Volume 7, Number 1, pp. 107 – 124.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Fama, E., & M. Jensen. (1983). Agency Problem and Residual Claims. *Journal of Law and Economics*, 26, 327-349.
- Farook, S. & Lanis, R. (2005). Banking on Islam? Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure. <http://www.afaanz.org/web2005/papers>.
- Farook, S., Hassan, M. K., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research (JIABR)*, 2(2), 114-141.
- Ghozali, Imam. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*, Badan Penerbit – Undip, Semarang.
- Gray, R., Owen, D., & Maunders, K., (1987). *Corporate Social Reporting: Accounting and Accountability*, Prentice-Hall International, USA.
- Gunarsih, T. (2003). *Struktur Kepemilikan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance*. Kompak Nomor 8.
- Habbash, M. (2016). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Saudi Arabia. *Journal of Economic and Social Development*, 3(1), 87-103.
- Hackston, D. & Milne, M. J., (1996). Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 9(1), 77-100.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139-151.
- Haniffa, R. M. (2002). Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective. *Indonesian Management & Accounting Research*, 1(2), 128-146.
- Hogner, R. H., (1982). Corporate social reporting: 8 decades of development at US Steel, *Research in Corporate Social Performance and Policy*, 4, 243-250.
- Hopkins, M. (2007). *Corporate social responsibility and international development: is business the solution?* Earth scan/James & James.
- Hossain, M. A., Islam, K. S., & Andrew, J. (2006). Corporate Social and Environment Disclosure in Developing Countries: Evidence from Bangladesh. *Proceedings of the Asian Pacific Conference on International Accounting Issues*. Hawaii.
- Indrawaty & Wardayati, S. M. (2015). Implementing Islamic Corporate Governance (ICG) and Islamic Social Reporting (ISR) in Islamic Financial Institution (IFI). *3rd Global Conference on Business and Social Science*, 16-17 December, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Issalih, F. A., Amran, A., Darus, F., Yusoff, H., & Zain, M. Md. (2015). Islamic Corporate Social Reporting: Perspective of Makasid Al Shariah. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 11(1), 93-121.
- Istianingsih. (2015). Impact of Firm Characteristics on CSR Disclosure: Evidence from Indonesia Stock Exchange. *IJABER*, 13(6), 4265-4281.
- Jamali, D. (2008). A stakeholder approach to corporate social responsibility: A fresh perspective into theory and practice. *Journal of Business Ethics*, 82(1), 213-231.

- Jazil, T., & Syahrudin. (2013). The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian: Islamic Banks based on the Maqasid al-Shari'ah Approach. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 7(2), 279-301.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost & Ownership Structure. *Journal of Finance Economics*, 3(4), 305-360.
- Juhmani, O. (2014). Determinants of Corporate Social and Environmental Disclosure on Websites: the Case of Bahrain. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 2(4), 77-87.
- Kasri, R. A. (2016). *Maqasid al-Shariah* and Performance of Zakah Institutions. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9, 19-41.
- Khasharmeh, H. A., & Desoky, A. M. (2013). Online Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of the Gulf Cooperation Council (GCG) Countries. *Global Review of Accounting and Finance*, 4(2), 39-64.
- Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good Corporate Governance dan Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *JAAI*, 19(2): 126-136.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(1), 75-100.
- Lantos, G. (2001). The boundaries of strategic corporate social responsibility', *Journal of Consumer Marketing*, 18(7), 595-632.
- Larkin, Y. (2013). Brand perception, cash flow stability, and financial policy. *Journal of Financial Economics*, 110(1), 232-253.
- Lehman, C. (1983). Stalemate in Corporate Social Responsibility Research', *American Accounting Association Public Interest Section*, Working Paper.
- Lestari, P. (2013). Determinants of Islamic Social Reporting in Syariah Banks: Case of Indonesia. *International Journal of Business and Management Invention*, 2(10), 28-34.
- Lindblom, C. K. (1983). The concept of organisational legitimacy and its implications for corporate social responsibility disclosure. *American Association Public Interest Section*, Working paper.
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social Reporting by Islamic Banks. *ABACUS*, 42(2), 266-289.
- Malik, M. (2015). Al-Maqasid Al-Shariah (the Comprehensive Objective of Shari'ah). *Paper dipresentasikan pada Penang Institute-G25 Forum "Maqasid Syariah in a Constitutional Democracy*, 31 Oktober 2015, Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. Md. (2009). *Testing The Performance Measured Based on Maqashid al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks*. Malaysia: IIUM.
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. Md. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqashid syariah. *International Islamic University Malaysia Journal*.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. Md. (2015). Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqasid Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, August 2015, 55-77.
- Mohammed, M. O., Tarique K. Md., & Islam, R. (2015). Measuring the performance of Islamic banks using *maqasid*-based model. *Intellectual Discourse*, 23, 401-424.
- Nurkhin, A. (2010). *Corporate Governance* dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(1), 46-55.
- O'Donovan, G. (2002), "Environmental Disclosures in the Annual Report: Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol 15, No 3, pp. 344-71.
- Ousama, A. A., & Fatima, A. H. (2006). The Determinants of Voluntary Disclosure in the Annual Reports by Shariah-Approved Companies listed on Bursa Malaysia, *International Accounting Conference 3 IIUM*, 26-28 Juni, Malaysia.
- Othman, R., Thani, A. Md., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 12(12), 4-20.
- Othman, R., & Thani, A. Md. (2010). Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia. *International Business & Economics Research Journal*, 9(4): 135-144.



- Rama, A., & Meliawati. (2014). Analisis Determinan Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. *Equilibrium*, 2(1), 84-103.
- Roberts, W. (1992). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure an application of Stakeholder Theory. *Accounting Organizations and Society*, 17(6), 595-612.
- Rosmasita, H. (2007). Factors - Factors affecting social disclosure (Social Disclosure) in the annual financial statements of manufacturing companies in the Jakarta Stock Exchange. *Indonesia Journal of Accounting Research* Vol. 7.
- Rufino, M. A., & Machado. M. R. (2015). Determinants of Voluntary Social Information Disclosure: Empirical Evidence in Brazil. *Journal of Education and Research in Accounting*, 9(4), 367-383.
- Salman, K. R. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*. Edisi Kedua. Cetakan I. Penerbit Indeks Jakarta.
- Salman, K. R., Amir, Farid, M., & Budiana, K. M. (2018). New Evidence of the Effect of Tax Aggressiveness and Corporate Characteristics on the Level of Corporate Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9): 1263-1272.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). *Research methods for business: A skill building approach*, Wiley-India.
- Sayler, A. (1998). R & E Tax Credit. American Association of Engineering Societies.
- Segarra, M. (2012). Three overlooked small-business tax breaks. CFO Magazine.  
<http://sta.cfo.com/tax/2012/02/three-overlooked-small-business-tax-breaks/>
- Sembiring, E. R. (2006). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Maksi*, 6(1), 69-85.
- Setyorini, C. T., & Ishak, Z. (2012). Corporate Social and Environmental Disclosure: A Positive Accounting Theory View Point. *International Journal of Business and Social Science*, 3(9): 152-164.
- Suchman, M. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20, 571-610.
- Sulaiman, M., (2005). "Islamic corporate reporting: Between the desirable and the desired", Research Centre, IUM Publication.
- Sunarsih, U., & Ferdiansyah. (2017). Determinants of the Islamic Social Reporting Disclosure. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 9(1): 69-80.
- Sunarto, C. N. (2016). Syariah Governance Dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting Index dan Global Reporting Index pada Perbankan Syariah Periode 2010-2013. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1): 30-57.
- Suttipun M., & Stanton, P. (2012). The Differences in Corporate Environmental Disclosures on Websites and in Annual Reports: A Case Study of Companies Listed in Thailand, *International Journal of Business and Management*, 7(14): 18-31.
- Thomas, A. H. (2006). Corporate internal investigations: Balancing firm social reputation with board fiduciary responsibility. *Corporate Governance*, 6(5), 635-642.
- Ticehurst, G., & Veal, A. (2000). *Business research methods*. Frenchs Forest, Australia: Longman.
- Turker, D. (2009). Measuring corporate social responsibility: A scale development study. *Journal of Business Ethics*, 85(4): 411-27.
- Veal, A. J. (2005). *Business research methods: a managerial approach*. Pearson Addison Wesley, South Melbourne.
- Visser, W. (2008). Corporate social responsibility in developing countries, *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility (Oxford University Press, Oxford)*, 473-9.
- Wiyuda, A., & Pramono, H. (2017). Pengaruh *good corporate governance*, karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan terdaftar di BEI. *Kompartemen*, 15(1), 12-25.
- Zakarsyi. (2008). *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Zeng, T. (2016). Corporate Social Responsibility, Tax Aggressivity and Firm Market Value *Accounting Perspectives*, 15(1): 7-30.



Dokumen pendukung luaran Wajib #1

Luaran dijanjikan: Buku Hasil Penelitian

Target: sudah terbit

Dicapai: Terbit

Dokumen wajib diunggah:

1. Buku hasil penelitian meliputi cover, lembar yg memuat ISBN dan daftar isi

2.

Surat keterangan terbit dari penerbit dengan menyebutkan jumlah eksemplar yang dice tak

Dokumen sudah diunggah:

1. Buku hasil penelitian meliputi cover, lembar yg memuat ISBN dan daftar isi

2.

Surat keterangan terbit dari penerbit dengan menyebutkan jumlah eksemplar yang dice tak

Dokumen belum diunggah:

- Sudah lengkap

Judul Buku: Tata Kelola, Maqashid Syariah, dan Pelaporan Sosial

Nama Penerbit: Mitra Wacana Media

Website Penerbit: <https://www.mitrawacanamedia.com/>

ISBN: 978-602-318-473-6

Tahun Terbit: 2020

Jumlah Halaman: 158

URL Buku:

[https://www.mitrawacanamedia.com/Tata%20Kelola,%20Maqashid%20Syariah,%20dan%20Pelaporan%20Sosial?search=tata%20kelola&category\\_id=0](https://www.mitrawacanamedia.com/Tata%20Kelola,%20Maqashid%20Syariah,%20dan%20Pelaporan%20Sosial?search=tata%20kelola&category_id=0)

Buku **Tata Kelola, Maqashid Syariah, dan Pelaporan Sosial** ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester akhir S1/D3 Akuntansi/Manajemen/Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah yang memprogram mata kuliah Akuntansi Syariah Lanjutan atau bagian dari materi dalam mata kuliah Perbankan Syariah, juga bagi mahasiswa yang memprogram skripsi sebagai salah satu sumber referensi yang dapat digunakan. Selain itu, buku ini dapat pula bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi. Pihak akademisi dapat menjadikan buku referensi sebagai bahan pengajaran, pembimbingan skripsi, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Bagi praktisi terutama praktisi di bidang perbankan syariah, buku ini dapat dijadikan pegangan dalam memahami tata kelola yang baik, maqashid syariah dan pelaporan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam buku ini bagian pendahuluan, dijelaskan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Pada bagian tinjauan pustaka, dibahas hasil telaah teori dasar, konsep, dan keterkaitan antar konsep. Dalam tinjauan pustaka, buku referensi ini membahas konsep tata kelola dalam perspektif Islam, konsep maqashid syariah dan konsep pengungkapan tanggung jawab sosial. Pada bagian metode penelitian, dijelaskan rancangan penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel penelitian, *sampling method*, serta teknik analisis data yang digunakan. Dalam metode penelitian, diperjelas konsep pada tataran yang lebih operasional, yaitu tingkat tata kelola Islami, indeks maqashid syariah, dan tingkat pelaporan sosial Islami. Definisi dan pengukuran variabel mengacu pada riset-riset empiris sebelumnya. Pada bagian hasil dan pembahasan, diuraikan secara mendalam analisis deskriptif dari setiap variabel, hasil uji validitas dan reliabilitas, hasil pengujian hipotesis, dan diskusi atau pembahasan dari setiap hubungan antar variabel. Pada bagian kesimpulan dan saran, diringkas hasil pembahasan dari penelitian ini sehingga mampu menjawab masalah yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan.



Penulis adalah dosen tetap di STIE Perbanas Surabaya sejak tahun 2001. Setelah lulus dari SMAN 1 Tuban, penulis melanjutkan studi S1 jurusan Akuntansi di Universitas Airlangga. Penulis lulus S1 dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2000. Selanjutnya pada tahun 2006 penulis melanjutkan studi di Program Pascasarjana S2 Ilmu Akuntansi dari Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun 2014, penulis meneruskan kuliah pada jenjang S3 program studi Ilmu Akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya dan lulus pada tahun 2018. Bidang keahlian penulis adalah *aqd-based Islamic accounting, entities-based Islamic accounting, accounting of Islamic banking, taxation, cost accounting, dan management accounting*.

Di STIE Perbanas Surabaya, penulis mengajar mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah, Pengantar Perpajakan, Perpajakan, Akuntansi Biaya, dan Akuntansi Manajemen, untuk program studi D3 dan S1 jurusan Akuntansi; Akuntansi Syariah I, Akuntansi Syariah II, Akuntansi Perbankan Syariah, dan Pajak untuk Entitas Syariah pada program studi S1 Ekonomi Islam. Beberapa sertifikasi yang pernah diperoleh penulis adalah sertifikasi konsultan pajak (BKP) dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pada tahun 2006; dan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah pada tahun 2011 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, penulis juga lulus pada Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) pada tahun 2012 sehingga memperoleh gelar sertifikasi akuntansi syariah (SAS), *Chartered of Accountant (CA)* dari Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2013, dan *Certified of Public Accountant (CPA)* Australia pada tahun 2019.

Tata Kelola, Maqashid Syariah, dan Pelaporan Sosial

Dr. Kautsar Riza Salman

Dr. Kautsar Riza Salman



# Tata Kelola, Maqashid Syariah, dan Pelaporan Sosial

**Mitra  
Wacana  
Media**  
Penerbit

Akuntansi  
ISBN: 978-602-318-473-6  
  
9 786023 184736  
Harga P. Jawa Rp 75.000



**Mitra  
Wacana  
Media**  
Penerbit



Edisi Asli  
Hak Cipta © 2020 : Penulis  
Diterbitkan : **Penerbit Mitra Wacana Media**  
Telp. : (021) 824-31931  
Faks. : (021) 824-31931  
Website : <http://www.mitrawacanamedia.com>  
E-mail : [mitrawacanamedia@gmail.com](mailto:mitrawacanamedia@gmail.com)  
Office : Vila Nusa Indah 3 Blok KE.2 No.14  
Bojongkulur-Gunung Putri. Bogor

**Hak cipta dilindungi undang-undang.** Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).**
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, **dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).**

Dr. Kautsar Riza Salman

Tata Kelola, Maqashid Syariah, dan Pelaporan Sosial

Edisi Pertama

—Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020

1 jil., 17 x 24 cm, 158 hal.

Anggota IKAPI No: 410/DKI/2010

ISBN: 978-602-318-473-6

1. Akuntansi

I. Judul

2. Tata Kelola, Maqashid Syariah, dan Pelaporan Sosial

II. Kautsar Riza Salman



# DAFTAR ISI

<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Teori Keagenan .....	7
2.2 Teori Legitimasi.....	9
2.3 Konsep Tata Kelola Islami.....	10
2.4. Konsep Maqashid Syariah.....	17
2.5 Konsep Pelaporan Sosial Islami.....	26
2.6. Kerangka Konseptual .....	34
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1. Desain Penelitian .....	37
3.2. Definisi Operasi dan Pengukuran Variabel.....	38
3.3. Indeks Maqashid Syariah .....	41
3.4. Pelaporan Sosial Islami .....	49
3.5. Populasi dan Sampel Penelitian.....	53
3.6. Sampel Penelitian .....	53
3.7. Teknik Analisis Data .....	54
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
4.1. Deskripsi Subyek Penelitian .....	61
4.2. Deskripsi Variabel Tingkat Tata Kelola Islami .....	61
4.3. Deskripsi Variabel Indeks Maqashid Syariah .....	66
4.4. Deskripsi Variabel Tingkat Pelaporan Sosial Islami .....	67
4.5. Hasil Pengujian Model Pengukuran (Outer Model) .....	70
4.6. Pengujian Validitas Konvergen Awal .....	71

<b>BAB 5</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
5.1.	Simpulan.....	83
5.2.	Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>95</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>		<b>145</b>
<b>INDEKS .....</b>		<b>149</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>		<b>153</b>

## SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENERBIT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ariyanto, S.E.

Jabatan : Kepala Pemasaran dan Penerbitan

Nama Penerbit : Mitra Wacana Media

No. IKAPI/APPTI : 410/DKI/2020

Alamat Penerbit : Villa Nusa Indah III Blok KE II/ 14-15, Bojong Kulur, Gunung Putri,  
Bogor,16969

Telp. : 021 82423435 Faks 021 82431931

Nomor Ponsel : 0815 8965009

Surel Pribadi : [ari.mitra74@gmail.com](mailto:ari.mitra74@gmail.com)

Dengan ini menyatakan bahwa:

- merupakan anggota IKAPI atau APPTI dengan nomor keanggotaan tertulis di atas,
- mempunyai tim editor bahasa dan ahli tata letak,
- menyetujui penyebarluasan (pendistribusian) versi elektronik (*e-book*) edisi pertama dilakukan oleh Kemenristekdikti,
- biaya penyuntingan dan tata letak tulisan akan ditanggung oleh penulis.

Dengan ini bersedia melakukan proses penyuntingan (editing) dan tata letak untuk:

Judul Naskah : Tata Kelola, Maqashid Syariah, dan Pelaporan Sosial

Nama Penulis : Dr. Kautsar Riza Salman

ISBN : 978-602-318-473-6

Format : 17 x 24 cm

Eksemplar : 250 Eksemplar

Bidang Ilmu : Akuntansi

Institusi : STIE PERBANAS SURABAYA

Alamat Institusi : Jl. Nginden Semolo No.34-36, Ngenden Jangkungan, Kec. Sukolilo,  
Kota SBY, Jawa Timur 60118

Telp./Faks : [\(031\) 5947151](tel:(031)5947151)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain atas naskah yang saya kirim, saya bersedia bertanggung jawab, dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

30 November 2020



( Ariyanto, S.E. )



Dokumen pendukung luaran Tambahan #1

Luaran dijanjikan: Prosiding dalam pertemuan ilmiah Internasional

Target: sudah terbit/sudah dilaksanakan

Dicapai: Published

Dokumen wajib diunggah:

1. Artikel yang terbit

Dokumen sudah diunggah:

1. Artikel yang terbit

Dokumen belum diunggah:

-

Peran penulis: first author

Nama Konferensi/Seminar: International Virtual Conference on Interdisciplinary Research in Higher Education

Lembaga penyelenggara: The International Association of Scholarly Publishers, Editors and Reviewers (IASPER)

Tempat penyelenggara: ZOOM Video Conferencing

Tgl penyelenggaraan mulai: 1 Oktober 2020 | Tgl selesai: 2 Oktober 2020

ISBN/ISSN: xxxx

Lembaga pengindeks: -

URL website: <https://aseanresearch.org/iasper/conference>

Judul artikel: Governance, Maqashid Sharia and Their Effect on Islamic Social Reporting: Cases in Indonesia



International Association  
of Scholarly Publishers,  
Editors and Reviewers

# International Virtual Conference on Interdisciplinary Research in Higher Education

# IVCIRHE 2020

Theme: "Research for Collective Survival  
in the New Normal Environment."

October 1-2, 2020



Co-hosted by:  
Mountain Province  
State Polytechnic College

# vision

Community of ethical and scholarly publishing practitioners

# mission

1. To advance the professional expertise of the scholarly publishers, editors and reviewers;
2. To provide expert services in scholarly journals;
3. To promote publication ethics in scholarly journals;
4. To support various causes in the promotion, development and advancement of scientific publication.

---

# contents

- 01** Messages
- 05** Conference Programme
- 07** Paper Presentations
- 11** Awards
- 15** Plenary Speech
- 18** Keynote Speech
- 22** Synthesis of Abstracts
- 24** Abstracts

I take this platform with such a privilege and honor to welcome you to the **2020 International Virtual Conference on Interdisciplinary Research in Higher Education (IVCIRHE 2020)** with a theme “Research for Collective Survival in the New Environment.”

The call for synergistic collaboration intertwined with technology is timely, relevant, and needed to survive as we embrace new normal. The globe at this very moment has evolved into a village. If you are not in then, you live in a primitive world, thereby making you to be extraneous and to become extinct from the highly competitive world of academia.

The higher education institutions worldwide need to accentuate the indispensable role of research to become significant to time demands. Now is an opportune moment to reconnect and start advancing on repackaging or reshaping learning in conjunction with the industries’ robust expectations and global needs. This idea becomes a reality if all of us will work collectively.

As we take the synergistic collaboration journey, we pave the way to a fresh chapter of beyond-compare learning. It is learning that principally built in a global collaborative approach where we expect innovations and creativity as the cornerstones of knowledge. This endeavor is an exciting voyage as it opens opportunities to local, national, and international educators to exchange best practices in academe.

Finally, I congratulate all of you for responding to the International Association of Scholarly Publishers’ call. Your response shows your commitment and passion for upholding excellence in all three pillars of education - Instruction, Research, and Community Extension.

As my final message, I wish you the very best in all your aspirations to serve your respective community and become expert or authority in your field of expertise.



**NIÑO MIRANDA DECENORIO, PhD**  
Senior Vice-President  
Bath Spa University  
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates



MESSAGE



# MESSAGE

Warmest greetings from Singapore Institute of Management, Singapore!

I would like to commend the International Association of Scholarly Publishers, Editors and Reviewers, Inc. (IASPER) for organizing the **International Virtual Conference on Interdisciplinary Research in Higher Education (IVCIRHE 2020)** on **October 1-2, 2020**. As a scholarly body committed with its mission in advancing the professional expertise of scholars, reviewers, editors and publishers, IASPER has been providing a meaningful platform for thought-leaders, academic researchers and practitioners to explore critical issues of interdisciplinary advancement and innovation through research presentation and publication.

It is my great pleasure to welcome the participants and presenters to IASPER's IVCIRHE 2020. The conference theme this year is **"Research for Collective Survival in the New Normal Environment."** This conference is conducted online in light of the COVID-19 pandemic we face as a global community. The disruption caused by the pandemic affects all sectors of society. COVID-19 brings us problems and challenges that no single discipline is able to address. Many of the most pressing problems society faces – such as health-care, climate change, poverty – are multifaceted and complex, and effective solutions require the collaboration and integration of many different disciplinary expertise and insights. The impact of the pandemic on society has opened a window of opportunity in research towards tackling societal challenges that requires an interdisciplinary approach. Furthermore, a focus has been placed on collaboration in these contexts. Interdisciplinary collaboration has become more prominent as the rapid growth of knowledge and increasing specialization makes it difficult for any one individual to comprehend and integrate all the disciplinary knowledge and insights to particular complex problems. We will see more interdisciplinary research that deploys collaborative approaches and attains collective outcomes in the future.

This year's 2-day conference provides ample opportunities for discussions and exchange of information and ideas among participants all over the world. Indeed, IVCIRHE 2020 is the result of great collaboration among the organizer and members to make it a successful conference.

I would like to express my support to all the participants, presenters as well as the organizer of IVCIRHE 2020. I strongly believe that we need to collaborate and innovate in order to survive in the new normal.

In closing, I wish everyone a successful and fruitful conference.

Thank you.

**DR TIMOTHY CHAN, PhD, FCPA(Australia), FSCS(Singapore)**  
Director, Academic Division  
Singapore Institute of Management

***“Research for Collective Survival in the New Normal Environment.”***

Welcome to the **International Virtual Conference on Interdisciplinary Research in Higher Education (IVCIRHE 2020)**! The theme of the conference, ***“Research for Collective Survival in the New Normal Environment”*** is certainly timely as mankind all over the world is experiencing a huge challenge caused by the Covid-19 pandemic. The new normal environment which has occurred as the result of the virus involves many changes at all levels and facets of our lives leading to significant adjustments in human interactions and behaviour in society.

The pandemic has devastated the global economy, intensified geopolitical tensions and upended lives causing a crisis like no other, and despite drastic controls and tough restrictions, cases seem to have soared again. The global death toll has just passed one million and the World Health Organization has warned the deaths could even double to two million without more global collective action.

As long as the world has not found a cure or a vaccine for the virus, the new normal looks set to remain for a very long time. Governments and education bodies need to start preparing for the long-term impact Covid-19 will have on today’s society. But what exactly is the “new normal”? What are the implications of this new normal to the society? What are its impacts? How have we been coping with it? Would herd immunity be part of our new normal? And how long until we return to the “old normal”?

A recent study has demonstrated that the new normal has resulted in de-globalization, institutional change, government participation in, and interference with business, socio-political movements, rapid communications, digital crime, and disruptive innovations. It has further been found that the shift to Work From Home risks exacerbating pre-existing inequalities in the labour market. Covid-19 has shown us how vulnerable society is.

In higher education too, the wheels of change have been set in motion. The pandemic has made online learning the new normal, regardless of a learner’s age and goals, providing more flexibility, access to expertise, and value for money. But there are also adverse impacts. It has been reported that given that college and university faculty hastily moved courses online without much support, online learning is being done poorly in many quarters of the United States. It’s consequently getting a bad reputation at many campuses.

We might still be at an early stage to review and evaluate the effectiveness, efficiency or quality of the strategies and plans that have been and are being implemented in response to the pandemic. However, this in no way obviates the need for discussions and research to be conducted especially with respect to our collective survival in the new normal environment.

I hope this conference will bring intellectual ideas together so we as a global community can move forward with insight and informed understanding in how we can collectively survive in the new normal.



**ASSOCIATE PROFESSOR DR. MUNIR SHUIB**  
Industry and Community Engagement Coordinator  
National Higher Education Research Institute  
Universiti Sains Malaysia  
Malaysia



# MESSAGE



# MESSAGE

On behalf of the Mountain Province State Polytechnic College, I am sending my warmest greetings to the participants and organizers of the INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY RESEARCH IN HIGHER EDUCATION.

Recognizing that research is central to sustainable development paths, we view this occasion as an auspicious gathering for our researchers and other academicians. During this period where nations around the world are experiencing the impact of the COVID 19 pandemic, studies that seek to alleviate the challenging situations of societies and contribute to collective survival gain significant attention. This sharing of studies is an effective platform for knowledge dissemination and for the application of solutions at the national and local levels as we ascertain our role in the progressive transformation of our society.

May we draw novel ideas that are valuable both to the academia and our nations. Let this also be an opportunity to renew ties and forge new friendships among ourselves.

**Rexton Fagtang Chakas, Ph.D.**

President

Mountain Province State Polytechnic College

Philippines

# CONFERENCE PROGRAMME

## DAY 1 • October 1, 2020

- 8:30 – 9:00a.m. Online Registration
- 9:01 – 9:10a.m. Invocation  
National Anthems
- 9:11 – 9:20a.m. Opening Remarks and Declaration of the  
Opening of the Conference  
**DR. GENARO VIRADOR JAPOS**  
President, Philippine Association of Institution for  
Research, Inc.  
Regular Member, National Research Council of the Philippines
- 9:21 – 9:30a.m. Declaration: Synthesis of Abstracts  
**MR. RUSSEL B. OBSIOMA**  
Xavier University – Ateneo de Cagayan  
Philippines
- 9:31 – 9:35a.m. Introduction of Keynote Speaker I
- 9:36 – 9:50a.m. Keynote Speaker I  
**DR. CHARLINE F. NIXON**  
Dean, Chairperson Advisory Council  
EC-Council University  
USA
- 9:51 – 9:55a.m. Introduction of Keynote Speaker II
- 9:56 -10:15a.m. Keynote Speaker II  
**PROF. DR. DAWN YONALLY**  
International Education Consultant  
Texas, USA
- 10:16 – 10:25a.m. Awarding Ceremony  
Best Abstract  
Best Paper Award
- 10:26 – 10:30a.m. Introduction of Keynote Speaker III
- 10:31 – 10:50a.m. Introduction of Keynote Speaker III  
**DR. DJUWARI**  
International President, IASPER, INC.  
Head of Language Laboratory, STIE Perbanas Surabaya,  
Indonesia
- 10:51 – 11:00a.m. Session Break
- 11:01 – 12:00n.n. International Paper Presentations
- 12:01 – 1:00p.m. LUNCHBREAK
- 1:01 – 5:30p.m. International Paper Presentations



**DAY 2 • October 2, 2020**

8:30 – 9:00a.m.	Online Registration
9:01 – 9:10a.m.	Invocation National Anthems
9:11 – 9:20a.m.	Opening Remarks
9:21 – 9:25a.m.	Introduction of Keynote Speaker IV
9:26 – 9:45a.m.	Keynote Speaker IV <b>DR. REXTON F. CHAKAS</b> President Mountain Province State Polytechnic College Philippines
9:46 – 9:50a.m.	Introduction of Plenary Speaker I
9:51 – 10:11a.m.	Plenary Speaker I <b>DR. IDA GAURAN-TUDY</b> Program Coordinator, Master of Arts in Education COR Jesu College, Philippines
10:12 – 12:10n.n	International Paper Presentations
12:11 – 1:10p.m.	LUNCHBREAK
1:11 – 4:15p.m.	International Paper Presentations
4:16 – 4:20p.m.	Introduction of Plenary Speaker II
4:21 – 4:40p.m.	Plenary Speaker II <b>PROF. DR. KARAPETYAN MARINA VALENTINOVA</b> English Chair, Vladimir State University Moskow, Russia
4:41 – 4:45p.m.	Introduction of Plenary Speaker III
4:46 – 5:10p.m.	Plenary Speaker III <b>DR. SAWITRI SUWANAROA</b> Head, International Relations Office Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Thailand
5:11 – 5:30p.m.	Awarding Ceremony Best Oral Presenter Award Awarding of Certificates to the Participants Grand Pictorial

# International Virtual Conference on Interdisciplinary Research in Higher Education (IVCIRHE 2020)

ZOOM VIDEO TELECONFERENCING • OCTOBER 1-2, 2020

## Day 1 – Breakout Room 1: October 1, 2020

Time	Title of Paper	Presenter/Institution/Country
<b>A. SET A</b>		
10:51 – 11:10am	Teachers Applicants' Self- Efficacy and English Proficiency Test	<b>VANESA B. DUNGOG, JOEFEL T. LIBO-ON</b> Romblon State University
11:11 – 11:30am	Inventory of Information and Communication Technology (ICT) Skills: Basis for Crafting an Extension Program	<b>SUSAN AGUILAN-LOPEZ</b> Mountain Province State Polytechnic College
11:31 – 11:50am	Employability of 2016 to 2018 Board-Course Graduates of SDSU-San Miguel, Philippines	<b>RUDY F. DALING</b> Surigao del Sur State University-San Miguel Campus
11:51-12:00nn	<b>Open Forum (SET A)</b>	
<b>B. SET B</b>		
1:00 – 1:20pm	Understanding Road Accident Causes	<b>CLAIRE KAPLAAN PECKLEY LAFADCHAN</b> Mountain Province State Polytechnic College
1:21 – 1:40pm	Competency Level, Employers' Expectations and Work Immersion Performance of Senior High School TVL Students	<b>DONNIE MARC LOUIE I. ROBLE</b> De La Salle University – Dasmariñas
1:41 – 2:00pm	Resource Capability and Competitive Achievements of Public Pilot Schools in Southern Philippines	<b>FANNIE A. SALVATIERRA</b> Cotabato City National High School-Rojas
2:01 – 2:20pm	Implementation Science of Pediatric Palliative Care in Lower-Middle-Income Countries in Southeast Asia: An Integrative Review	<b>JESTONI D. MANIAGO</b> University of the Philippines Manila
2:31 – 2:50pm	Level of Implementation of Vision, Mission, Goals, and Objectives of Bohol Island State University	<b>RIAME T. TUICO</b> Bohol Island State University - Balilihan Campus
2:51 – 3:05pm	<b>Open Forum (SET B)</b>	
<b>C. SET C</b>		
3:06 – 3:25pm	Academic Program Preferences of Grade 12 Senior High School Students of Paracelis, Mountain Province	<b>DIXTY L. CARANTO</b> Mountain Province State Polytechnic College
3:26 – 3:45pm	Women's Involvement in Disaster Risk Reduction and Management in the Province of Pangasinan, Philippines	<b>RANDY F. SORIANO</b> Tandoc National High School
3:46 – 4:05pm	Sustainable Local Tourism Industry in BLOM Areas	<b>EDRICK RAY S. SANTAMARIA</b> Surigao del Sur State University – Lianga = Campus
4:06 – 4:25pm	Utilization of Bible-Related Concepts in Teaching Mathematics	<b>SOMERSON C. KIS-ING</b> Mountain Province State Polytechnic College
4:26 – 4:45pm	Resilience to Disaster of Beach Resorts in Lianga Bay Municipalities	<b>LIAFLORA O. ORCULLO</b> Surigao del Sur State University – Lianga Campus
4:46 – 5:15pm	Rape Profile in Mountain Province, Philippines	<b>CLAIRE KAPLAAN PECKLEY LAFADCHAN</b> Mountain Province State Polytechnic College
5:16 – 5:30pm	<b>Open Forum (SET C)</b>	

## Day 1 – Breakout Room 2: October 1, 2020

Time	Title of Paper	Presenter/Institution/Country
<b>A. SET A</b>		
10:51 – 11:10am	Research Environment and Research Orientations of Senior High Schools in Southern Philippines	<b>EDMAR E. MENDOZA</b> Notre Dame Village National High School
		<b>SAIDAMIN P. BAGOLONG</b> Cotabato City State Polytechnic College
11:11 – 11:30am	Indirect Feedback for Syntactic Errors Delivered through Collaborative Negotiation and Group-Chat Mediation	<b>SANDRA B. AGUIRRE</b> Mountain Province State Polytechnic College
11:31 – 11:50am	Project Educational-Video Assisted Reciprocal and Strategic Reading (Eares): An Intervention Program to Address Difficulties in Word Recognition and Comprehension Among Grade 6 Pupils in Tuhian Elementary School, Philippines	<b>ALLAN A. TALAIN</b> Department of Education- Division of Quezon
11:51-12:00nn	Open Forum (SET A)	
<b>B. SET B</b>		
1:00 – 1:20pm	Locus of Control and Attitudes of Stakeholders Towards Inclusive Education	<b>SALOME C. LATABEN</b> Mountain Province State Polytechnic College
1:21 – 1:40pm	Developing Research Culture among Basic Education Teachers of Batangas Province, Philippines	<b>EDJIE P. CALANOG</b> San Gregorio Integrated School
1:41 – 2:00pm	Service Quality Dimensions and Student Satisfaction of Frontline Services in a State Higher Education Institution	<b>DARWIN PHILIP C. ALERA</b> Mountain Province State Polytechnic College
2:01 – 2:20pm	The Implementation of Students Affairs Services of Ifugao State University-Potia Campus: A Formative Evaluation	<b>MATRONILLO M. MARTIN</b> Ifugao State University Potia Campus
2:31 – 2:50pm	Financial Decision Making-skills of Managers of Small and Medium Enterprises in Relation to Business Performance	<b>JOHN PHILIP S. RACAZA</b> Jose Rizal Memorial State University, Dapitan Campus
2:51 – 3:05pm	Open Forum (SET B)	
<b>C. SET C</b>		
3:06 – 3:25pm	Governance, Maqashid Sharia and Their Effect on Islamic Social Reporting: Cases in Indonesia	<b>KAUTSAR RIZA SALMAN</b> STIE Perbanas Surabaya
3:26 – 3:45pm	Compliance to Gynecological Diagnostic Examinations	<b>CALUM JAN A. KITONGAN</b> Mountain Province State Polytechnic College
3:46 – 4:05pm	Impact of Agricultural Loan to Local Farmers in Surigao del Sur, Philippines	<b>AIZA CORPUZ – GUIBIJAR</b> Surigao del Sur State University – San Miguel Campus
4:06 – 4:25pm	Building Ethnic Identity Through Hybridity and Anaphoric Tropes in Selected Igorot Ethno Music	<b>JONNELLE D. FAGSAO</b> Mountain Province State Polytechnic College
4:26 – 4:45pm	Predictors of Junior High School Enrollment for Proposed Appropriate Forecasting Model with Confirmatory Factor Analysis	<b>JOEFEL T. LIBO-ON</b> Romblon State University
5:16 – 5:30pm	Open Forum (SET C)	

## Day 2 – Breakout Room 1: October 2, 2020

Time	Title of Paper	Presenter/Institution/Country
<b>A. SET A</b>		
10:15 – 10:35am	Internationalization Practices of Philippine Higher Education: Tier 4 Higher Education Institutions' Perspectives	<b>EMILSON B. VIBAR</b> Polytechnic University of the Philippines- Sta. Mesa/ University of Santo Tomas- España
10:36 – 10:55am	Heirloom of Knowledge: Teacher-Parents and their Prioritization of the Education of their Children	<b>KATHERINE JOYCE M. CASTRO</b> Polytechnic University of the Philippines
10:56 – 11:15am	On the Translation and Validation of MPSPC's VMGO as L2-L1 Learning Practice	<b>JONNELLE D. FAGSAO</b> Mountain Province State Polytechnic College
11:16 – 11:35am	Issues, Perceptions, and Challenges of Amalgamation in Higher Education Institutions in Calabarzon: Quality School Management Strategic Plan	<b>MAURO D. LUCIDO JR.</b> Laguna State Polytechnic University - San Pablo City
11:36 – 11:55am	Entrepreneurial Management of Dole Kabuhayan Beneficiaries	<b>DARWIN PHILIP C. ALERA</b> Mountain Province State Polytechnic College
11:56-12:10nn	Open Forum (SET A)	
<b>B. SET B</b>		
1:10 – 1:30pm	Feedbacks on OJT Program from Students: Inputs for Enhanced Local Internship in Agriculture	<b>HONEYLET J. NICOLAS</b> Bulacan Agricultural State College
1:31 – 1:50pm	Managing Mathematics Instruction in Small Schools in the Province of Batangas, Philippines	<b>CARLOS M. ROSALES</b> San Nicolas Integrated High School
1:51 – 2:10pm	Strand and Statehood Predictors of Senior High School Graduates in Aurora State College of Technology	<b>ALFREDO C. PADIOS JR.</b> Aurora State College of Technology
2:11 – 2:30pm	Career Development Program for Junior High School English Teachers	<b>BLADEMER O. MANALO</b> Coral na Munti National High School
2:31 – 2:50pm	Development and Pre-Use Evaluation of Instructional Materials in Undergraduate Animal Science Courses for Agriculture Programs	<b>HONEYLET J. NICOLAS</b> Bulacan Agricultural State College
2:51 – 3:05pm	Open Forum (SET B)	
<b>C. SET C</b>		
3:06 – 3:25pm	Capability of Surigao Del Sur in Establishing Call Center	<b>TESSIL JOY L. LOREN</b> Surigao del Sur State University
3:26 – 3:45pm	Effects of Different Agricultural Waste-Derived Biochar on Soil Chemical Properties under Soil Paddy Condition	<b>ANGELICA L. LABIANO</b> Surigao del Sur State University
3:46 – 4:05pm	VirGu: Optimized Campus Virtual Tour Guide Based on A* Algorithm	<b>MELIZANDE S. URIARTE</b> Surigao del Sur State University
4:06 – 4:15pm	Open Forum (SET C)	

## Day 2 – Breakout Room 2: October 2, 2020

Time	Title of Paper	Presenter/Institution/Country
<b>A. SET A</b>		
10:15 – 10:35am	Supply Chain of Seaweeds in Surigao del Sur, Philippines	<b>BERNARDITA G. QUEVEDO</b> Surigao del Sur State University
10:36 – 10:55am	Level of Skills on MS-Office Productivity Software and Use of Internet for Communication of Office Clerks	<b>WINZEAL R. AGOC</b> Bohol Island State University - Balilihan Campus
10:56 – 11:15am	The Agronomic Traits and Yield Performance of the White Corn Varieties Intercropped with different Legumes under Surigao del Norte Condition	<b>ERMA C. TAER</b> Surigao State College of Technology – Mainit Campus
11:16 – 11:35am	Design and Fabrication of Arduino-based Microcontroller Development Training Board	<b>WENDELL S. GALEOS</b> Mindanao State University - Naawan
11:36 – 11:55am	Establishment of Dragon fruit (Pitaya) Plantation	<b>DANALYN J. DONES</b> Surigao del Sur State University – Lianga Campus
11:56-12:10nn	Open Forum (SET A)	
<b>B. SET B</b>		
1:10 – 1:30pm	Management of Alternative Dispute Resolution (ADR) System-Mediation among Public High Schools in Southern Philippines	<b>ANALYN M. BALLESTEROS</b> Camp Siongco National High School
1:31 – 1:50pm	Citizen Satisfaction: Assessing the Delivery of Services of the Bontoc Local Government	<b>SAIDAMIN P. BAGOLONG</b> Cotabato City State Polytechnic College
1:51 – 2:10pm	Tracer Study of Bachelor of Science in Business Administration Academic Year 2011-2016: An Online Tool	<b>LUZLYN M. AGWILANG</b> Mountain Province State Polytechnic College
2:11 – 2:30pm	Assessment on the Readiness of BISU Balilihan Electronics Technology Program to Meet Industry Standard	<b>ALEX T. AJOC</b> Surigao del Sur State University
2:31 – 2:50pm	Deconstruction of Themes in 'Grand Theft Auto IV'	<b>ERNESTO B. ALIJAY JR.</b> Bohol Island State University - Balilihan Campus
2:51 – 3:05pm	Open Forum (SET B)	
<b>C. SET C</b>		
3:06 – 3:25pm	Spectrum of Photosynthetically Active Radiation (PAR) Most Beneficial to Radish ( <i>Raphanus sativus L.</i> ) Root Growth and Weight	<b>JOCELYN P. SERRANO</b> Surigao del Sur State University – San Miguel Campus
3:26 – 3:45pm	Pilot Sensing Device Simulator	<b>IRVIN B. DUMAPIAS</b> Bohol Island State University - Balilihan Campus
3:46 – 4:05pm	Android-Based Augmented Reality Tourists Guide Application	<b>CHRISTINE W. PITOS</b> Surigao del Sur State University
4:06 – 4:15pm	Open Forum (SET C)	

# IVCIRHE 2020 SESSION JUDGES



**DR. DJUWARI**  
STIE Perbanas Surabaya



**DR. GENARO V. JAPOS**  
Philippine Association of Institution for Research, Inc.



**DR. FRANCES THAISE CIMENE**  
University of Science and Technology of Southern Philippines

**DR. IVY CORAZON A. MANGAYA-AY**  
Bohol Island State University



**DR. IDA GAURAN-TUDY**  
COR Jesu College

**DR. EMILSON B. VIBAR**  
Polytechnic University of the Philippines- Sta. Mesa/  
University of Santo Tomas- España



**DR. JESTONI D. MANIAGO**  
University of the Philippines Manila

**DR. MATRONILLO M. MARTIN**  
Ifugao State University Potia Campus



**DR. SAIDAMIN P. BAGOLONG**  
Cotabato City State Polytechnic College

## Governance, Maqashid Sharia and Their Effect on Islamic Social Reporting: Cases in Indonesia



**KAUTSAR RIZA SALMAN**

<http://orcid.org/0000-0000-0000-0000>  
kautsar@perbanas.ac.id  
STIE Perbanas Surabaya  
Indonesia



**DJUWARI**

<http://orcid.org/0000-0002-2750-3463>  
djuwari@perbanas.ac.id  
STIE Perbanas Surabaya  
Indonesia



Research on disclosure of corporate social responsibility is still dominated by independent variables that are conventional in nature and are applied to conventional entities. It is still rare to find research that examines sharia variables on social responsibility disclosures and is carried out at Islamic commercial banks in Indonesia. The current study aims to obtain empirical evidence of the influence of the level of Islamic governance and the maqashid sharia index on Islamic social reporting. The research object is 11 Islamic commercial banks in Indonesia in the 2010-2016 period. The data analysis technique used Partial Least Square with SmartPLS version 3 software by applying convergent validity testing, discriminant validity, reliability, and hypothesis testing. The results of the research prove empirically the positive influence of Islamic governance on Islamic social reporting, while the maqashid sharia index does not affect Islamic social reporting. These results indicate the role of the implementation of Islamic governance on the extent of Islamic social reporting.

Keywords: Islamic governance, maqashid sharia index, Islamic social reporting, Indonesia

## Compliance to Gynecological Diagnostic Examinations



**CALUM JAN A. KITONGAN**

<https://orcid.org/0000-0003-0509-7123>  
jangiez16@yahoo.com  
Mountain Province State Polytechnic College  
Bontoc, Mountain Province



The periodic health screening examination like gynecological exams helps detect the following ailments of women that are especially amenable to early diagnosis and treatment. In Mt. Province, it is observed that some women undergo gynecological diagnostic examinations voluntarily and some do not. Others undergo such since these are required by their health care providers. The researchers believe that the over-all wellbeing of women in government service is very important as they are partners in development. The research design for this study is descriptive correlational research design. This method is used to gather information from the premenopausal and menopausal women concerning their profile, knowledge of gynecological diagnostic examinations specifically on papilloma smear, AA wash, mammography and ultrasonography; their compliance and their extent of compliance to these exams. The respondents are much knowledgeable on the gynecological diagnostic examinations. There is significant difference on the level of knowledge of respondents on the examinations according to civil status and occupation but no significant difference according to age and religion. Respondents very much complied with the different gynecological diagnostic examinations. However, there is no significant difference of the extent of compliance of the gynecological diagnostic examination according to age, civil status, religion and occupation. There is no relationship of knowledge and compliance on the gynecological diagnostic examinations.

Keywords: Gynecological, Diagnostics, premenopausal, menopausal, descriptive correlational research design, Philippines

\*Co-Author: Georgina P. Maskay, Mountain Province State Polytechnic College

# IASPER

## Book of Abstracts







**IASPER**

CONTACT DETAILS

emails: [iasper@aseanresearch.org](mailto:iasper@aseanresearch.org) • [info@aseanresearch.org](mailto:info@aseanresearch.org)  
+63 (088) 323 4282



<http://aseanresearch.org/iasper>



[www.facebook.com/iasper2014](http://www.facebook.com/iasper2014)



<https://www.linkedin.com/company/13369654>



<https://issuu.com/internationalassociationofscholarly>

Governance, Maqashid Sharia and Their Effect on Islamic Social Reporting:  
Cases in Indonesia

Kautsar Riza Salman  
[kautsar@perbanas.ac.id](mailto:kautsar@perbanas.ac.id)  
STIE Perbanas Surabaya

Djuwari  
[djuwari@perbanas.ac.id](mailto:djuwari@perbanas.ac.id)  
STIE Perbanas Surabaya

Abstract

*Research on disclosure of corporate social responsibility is still dominated by independent variables that are conventional in nature and are applied to conventional entities. It is still rare to find research that examines sharia variables on social responsibility disclosures and is carried out at Islamic commercial banks in Indonesia. The current study aims to obtain empirical evidence of the influence of the level of Islamic governance and the maqashid sharia index on Islamic social reporting. The research object is 11 Islamic commercial banks in Indonesia in the 2010-2016 period. The data analysis technique used Partial Least Square with SmartPLS version 3 software by applying convergent validity testing, discriminant validity, reliability and hypothesis testing. The results of the research prove empirically the positive influence of Islamic governance on Islamic social reporting, while the maqashid sharia index does not affect Islamic social reporting. These results indicate the role of the implementation of Islamic governance on the extent of Islamic social reporting.*

Keywords: Islamic governance, maqashid sharia index, Islamic social reporting

**INTRODUCTION**

Previous research about the disclosure of corporate social responsibility was still dominated by tax aggressiveness and company characteristics (company size, profitability, leverage). Studies examining the effect of the level of tax aggressiveness on disclosure of corporate social responsibility include Deegan (2002), Lanis & Richardson (2013), Zeng (2016), and Salman et al. (2018). Likewise, the study of Belkaoui & Karpik (1989); Hackston & Milne (1996); Sembiring (2006); Rosmasita (2007); Brammer & Pavelin (2008); Alarussi et al. (2009); Nurkhin (2010); Suttipun & Stanton (2011); Dhaliwal et al. (2011); Cormier et al. (2011); Badjuri (2011); Setyorini & Ishak (2012); Khasharmeh & Desoky (2013); Lestari (2013); Rama & Meliawati (2014); Istianingsih (2015); Abdulhaq & Muhamed (2015); Al-Ajmi et al. (2015); Rufino & Machado (2015); Habbash (2016); Sunarsih & Ferdiyansyah (2017), and Salman et al. (2018), tested the effect of company size on the level of corporate social responsibility disclosure.

This study seeks to examine the effect of Islamic governance and the maqashid sharia index on Islamic social reporting. Governance, in general, is a management system that is expected to improve banking performance, protect various stakeholders, increase compliance with applicable laws and regulations and general ethical values (Kholid & Bachtiar, 2015). In Islamic governance, adherence to sharia principles is something that differentiates it from governance in general.

Therefore the role of the Sharia Supervisory Board (SSB) as an important organ of Islamic governance aims to oversee the management of sharia entities to ensure the compliance of sharia entities to sharia principles.

In achieving its goals, a sharia entity is not allowed to be only profit-oriented but also required to reach the maqashid sharia where the measurement of its performance is based on sharia principles. Chapra (1985) describes that maqashid sharia includes guarding the mind (*al-aql*), guarding religion (*ad-din*), guarding the soul (*an-nafs*), guarding descent (*an-nasb*) and safeguarding property or wealth (*al-maal*). In the context of sharia business practices, Mohammed & Taib (2009) developed the concept of Abu Zahrah (1997) and explained that the achievement of maqashid sharia performance can be seen from three goals which include: educating individuals (*tahdzibul fard*), building justice (*iqamatul 'adl*) and achieve the public interest (*jalbul maslahah*). Several studies that have been carried out are still related to the use of maqashid sharia in the context of a performance measurement system such as research conducted by Mohammed et al. (2008), Jazil & Syahrudin (2013), and Kasri (2016).

This research is motivated to address the gaps in the results of previous studies regarding the determinants of Islamic social reporting, especially on three factors, namely the subject of analysis, variables and research findings. Judging from the subject of analysis, previous studies used conventional companies or entities, while current research uses another sample that is rarely researched by previous studies, namely Islamic bank entities. The second motivation is related to the research variables. Previous research was still dominated by determinants in the form of financial performance or company characteristics, while this study offered the novelty of variables, especially those related to Islamic principles such as Islamic governance and the maqashid sharia index as a determinant of the level of Islamic social reporting. The third motivation in this study relates to the limited findings of previous studies and shows inconsistent results.

Based on the previous background, the research questions of this study are: (1) Does the level of Islamic governance affect the level of Islamic social reporting at Islamic Banks in Indonesia? and (2) Does the maqashid sharia index affect the level of Islamic social reporting at Islamic Banks in Indonesia? The research objectives are (1) to obtain empirical evidence regarding the influence of the level of Islamic governance on the level of Islamic social reporting in Islamic Banks in Indonesia; and (2) obtain empirical evidence regarding the effect of the maqashid sharia index on the level of Islamic social reporting at Islamic Banks in Indonesia.

## **LITERATURE REVIEW**

### **Agency Theory**

Agency theory explains the existence of two options for principals to reduce agency problems by curbing the agent's opportunistic behaviour (Eisenhardt, 1989). The first way is to create governance structures that allow monitoring and assessment of the actual behaviour of agents (Chrisman et al., 2007). This governance structure includes reporting procedures, additional management or a board of directors (Donaldson & Davis, 1991). The second way is to create a governance structure where contracts are based on the actual results of agent behaviour (Eisenhardt, 1989). An example of this type is a salary in the form of an incentive, where the salary is given as an incentive for high performing agents (Chrisman et al., 2007). Risk is transferred to the agent and in this way can create motivation for the agent to behave in accordance with the interests of the principal (Davis et al., 1997; Eisenhardt, 1989). In essence, from these two ways, the principal can make a choice between constructing a governance structure based on the agent's

actual behaviour or the outcome of that behaviour (Eisenhardt, 1989). Both of these options generate agency costs that must be borne by the principal to monitor and assess agent behaviour.

### **Legitimacy Theory**

The legitimacy theory is based on the idea that the company has a social contract with the community, whereby the company agrees to take actions that the community wants for the company's business sustainability. Legitimacy theory argues that disclosures made by companies are related to environmental factors (economic, social and political) that these disclosures legitimize the company (Hogner, 1982; Lehman, 1983; Lindblom, 1983). In legitimizing its actions through disclosure, the company hopes to continue its business existence (Lehman, 1983). Lindblom (1983) adds that legitimacy theory shows that organizations aim to produce alignment between social values inherent in the company and social norms. In the end, disclosure of corporate social activities can be understood as a reaction to the environment around the company to legitimize the company's activities. According to the legitimacy theory, disclosure of corporate social responsibility is carried out so that the community gives a positive response to company performance. This response will give birth to good value for the company from the perspective of the community so that in the end it can increase the company's profit achievement.

### **Islamic Governance**

Corporate governance aims to create value-added for all stakeholders by regulating and controlling the company. The concept of corporate governance emphasizes two things, namely (1) the importance of fulfilling the rights of shareholders in order to obtain accurate and timely information; and (2) the company's obligation to disclose information about company performance, ownership, and stakeholders in an accurate, timely and transparent manner (Thomas, 2006).

Islamic governance refers to governance that is carried out in an Islamic manner. Of course, Islamic governance is different from corporate governance in general. The difference lies in the values or principles that underlie it. Islamic governance must be based on Islamic principles derived from the Al-Qur'an and the hadith of the Prophet. The principles of Islamic governance are regulated in Surah Al-Hajj verse 41 which means: *"(that is) those who, if We affirm their position on earth, undoubtedly they will pray, pay zakat, order to do ma'ruf and prevent any actions that are mungkar, and it is to Allah that all matters return"*.

### **Maqashid Sharia**

Islamic principles are not only applied by sharia entities in the field of fiqh in the form of the legality of products and services in accordance with Islamic principles alone, but more than that Islamic principles should have a wider impact on economic and social aspects as a consequence of efforts to achieve Maqashid Syariah (Sanrego, 2010). More specifically, Mohammed et al. (2008) explained that the objectives of Islamic banks can be derived from the objectives of sharia (maqashid sharia). This is because Islamic banks are not only aimed at achieving profit but also have goals with a social dimension. Referring to Abu Zahrah (1997), Mohammed et al. (2008) have developed a performance evaluation formula based on the concept of maqashid sharia. The indicators used include tahdzibul fard (educating the individual), iqamatul 'adl (establishing justice), and jalbul mashalih (welfare).

## **Islamic Social Reporting**

Maali et al. (2006) revealed that the key objective of Islamic Social Reporting (ISR) disclosure is to show whether the organization is adhering to Islamic principles; to show how the organization's operations affect Islamic society, and to assist others in carrying out their religious obligations. Sharia entities should disclose how to fulfil their responsibilities and obligations according to sharia principles such as sharia transactions, zakah payments to recipients (mustahik), alms (charities/gifts), wages, and the objectives of the business entity to protect the environment. In order to achieve the objectives of Islamic accounting, in the context of fulfilling compliance with sharia principles, companies are expected to disclose prohibited transactions that have been made, zakah payment obligations, and the role of corporate social responsibility. This shows that reporting in Islamic entities is broader and more detailed than the disclosures in conventional entities. Furthermore, Othman & Thani (2010) describe the existence of six disclosure themes in Islamic social reporting, namely finance and investment, products and services, employees, society, environment. (environment), and governance (corporate governance).

## **The Effect of the Level of Islamic Governance on the Level of Islamic Social Reporting**

Corporate governance is important for controlling manager behaviour that tends to benefit self-interest. Corporate governance can control the behaviour of managers in order to take actions that can also benefit company owners or in other words equalize the interests of management and company owners (Gunarsih, 2003: 156). This emphasizes the common interests rather than the interests of each individual. Company managers will seek to behave in accordance with the interests of the owner in achieving organizational goals. Thus, companies that implement corporate governance will disclose information on social responsibility more broadly. In other words, as explained by Indrawaty & Wardayati (2015) that the effectiveness of the implementation of Islamic governance is shown in Islamic social reporting, which is an index of social activity reporting from Islamic Banks.

Several researchers tested governance mechanisms for disclosure of social responsibility as did Nurkhin (2010); Badjuri (2011); and Wiyuda & Pramono (2017). Nurkhin (2010) shows that the composition of the independent board of commissioners has a positive and significant effect on the level of corporate social responsibility disclosure. Wiyuda & Pramono (2017) support the results of the study by Nurkhin (2010) and show that the board of commissioners has a positive and significant effect on the level of corporate social responsibility disclosure, while the audit committee has a negative effect on the level of social responsibility disclosure. On the other hand, Badjuri (2011) in his empirical study shows that there is no significant effect of the board of commissioners and the audit committee on social responsibility disclosure. In addition, Othman et al. (2009) found that the proportion of Muslim and non-Muslim boards affects the level of corporate social responsibility disclosure.

Islamic governance from the results of previous studies mostly still uses three indicators, namely the number of members of the Board of Directors, the number of members of the Sharia Supervisory Board (SSB) and the number of members of the Audit Committee. Several previous studies specifically carried out to examine the effect of the Sharia Supervisory Board (SSB) on the level of Islamic social reporting were conducted by Farook & Lanis (2005); Sunarto (2016); and Dienes & Velte (2016). Indrawaty & Wardayati (2015) explain that the results of empirical studies on the influence of the Sharia Supervisory Board (SSB), the Board of Commissioners and the Audit Committee show inconsistent results. Sunarto's study (2016) found empirical evidence regarding the positive influence of the number of members of the Board of Directors and the Sharia

Supervisory Board (SSB) on the level of Islamic social reporting but did not succeed in proving empirically the effect of the number of audit committee members on the level of Islamic social reporting. The results of Sunarto's study (2016) support the results of previous studies conducted by Farook & Lanis (2005).

Farook & Lanis (2005) obtained empirical evidence that Islamic governance as measured by the number of Sharia Supervisory Boards (SSB) has a positive and significant effect on the level of corporate social responsibility disclosure. The more the number of SSB members in supervising the operations of Islamic banks, the level of corporate social responsibility disclosure will also increase. On the other hand, Dienes & Velte (2016) in their study with a sample of companies in Germany failed to find a significant effect of expertise, meeting frequency, and the size of the Sharia Supervisory Board (SSB) on the level of corporate social responsibility disclosure. The difference between the results of Sunarto (2016) and the study of Farook & Lanis (2005) and Dienes & Velte (2016) can be caused because Sunarto (2016) uses the Islamic social reporting level, while other studies still use the level of social responsibility disclosure in general. Based on the previous description, the following research hypothesis can be formulated:

*H<sub>1</sub>: The level of Islamic governance affects the level of Islamic social reporting*

### **The Effect of the Sharia Maqashid Index on the Level of Islamic Social Reporting**

The relationship between the maqashid sharia index and the level of Islamic social reporting can be explained in the context of legitimacy theory. In the theory of legitimacy, it is explained that in order to be accepted by society, companies must fulfil social contracts through disclosing economic, social, and political information (Hogner, 1982; Lehman, 1983; Lindblom, 1983). Socio-political legitimacy refers to the suitability of organizational attributes, characteristics, and results in social norms (Aldrich & Fiol, 1994; and Suchman, 1995). Based on the theory of legitimacy, especially on socio-political legitimacy, organizational results can be in the form of financial performance and performance of maqashid sharia. Referring to this, it can be explained that companies with high financial performance and maqashid sharia performance tend to be more in accordance with social norms through disclosure of broader corporate social responsibility information. Thus, there is a positive relationship between the performance of the maqashid sharia and the level of Islamic social reporting.

Studies conducted by several researchers such as Hossain et al. (2006); Othman et al. (2009); and Sunarsih & Ferdiyansyah (2017) attempt to examine the empirical effect of company performance on the level of Islamic social reporting. Their results show inconsistencies. The study of Othman et al. (2009) succeeded in finding empirical evidence regarding the effect of company performance on the level of Islamic social reporting. The better the company's performance has an impact on the more extensive Islamic social reporting. However, the study of Hossain et al. (2006) and Sunarsih & Ferdiyansyah (2017) gave opposite results by failing to find a significant effect of company performance on the level of Islamic social reporting. Based on the previous description, the following research hypothesis can be formulated:

*H<sub>2</sub>: The maqashid sharia index affects the level of Islamic social reporting*

### **METHOD**

The total number of Islamic banks in Indonesia is 11 Islamic commercial banks in the research period 7 years 2010-2016. The research period was chosen to start in 2010 because Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/2009 concerning GCG for Sharia Entities came into

effect on January 1, 2010. The data that has been collected is then analyzed using the Partial Least Square (PLS) approach to test the research hypothesis. SmartPLS software version 3.0.

The level of Islamic Governance (Islamic Governance) is the level to which governance is carried out by Islamic entities in accordance with Islamic sharia. Research indicators refer to Act Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking and Bank Indonesia Regulation No. 11/33/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units which took effect on January 1, 2010. There are 11 indicators, namely: Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners; Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors; Completeness and implementation of Committee duties; Implementation of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board; Implementation of sharia principles in the activities of raising funds and channelling funds as well as services; Handling of conflicts of interest; Implementation of the Bank's compliance function; Implementation of the internal audit function; Application of the external audit function; Maximum Fund Distribution Limit; as well as Transparency of financial and non-financial conditions, reports on the implementation of good corporate governance and internal reporting.

Maqashid sharia index is the level of achievement of goals generated by a sharia entity which includes preservation of religion or faith, preservation of life or soul, preservation of intellect or mind. , preservation of progeny or family, and preservation of wealth. There are three indicators, namely: educating individuals (*tahdzibul fard*), building justice (*iqamatul 'adl*), and benefit (*maslahah*).

The level of Islamic social reporting is the extent to which the company carries out the process of disclosing social and environmental information on the company's economic actions to certain groups that have fulfilled Islamic principles. The indicator for this variable refers to Othman et al. (2009) and Othman & Thani (2010) consist of six indicators which include: Finance & Investment, Products, Employee, Society, Environment, and Corporate Governance.

## RESULT AND DISCUSSION

### Convergent Validity

After testing the third convergent validity, it was found that most of the indicators had met the convergent validity test (Table 1). This can be seen from the loading factor score.

Table 1. Outer Loading Results of Islamic Governance Variables

No.	Indicators	Outer Loading
1	Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners ( $X_{1.1}$ )	0.985
2	Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors ( $X_{1.2}$ )	0.769
3	Completeness and implementation of Committee duties ( $X_{1.3}$ )	0.995
4	Implementation of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board ( $X_{1.4}$ )	0.997
5	Implementation of sharia principles in raising funds and channelling funds as well as in services ( $X_{1.5}$ )	0.996
6	Handling of conflicts of interest ( $X_{1.6}$ )	0.633
7	Implementation of the Bank's compliance function ( $X_{1.7}$ )	0.872
8	Implementation of the internal audit function ( $X_{1.8}$ )	0.996

9	Maximum Fund Distribution Limit ( $X_{1.10}$ )	0.538
10	Transparency of financial and non-financial conditions, reports on the implementation of good corporate governance and internal reporting ( $X_{1.11}$ )	0.997
11	Educating Individuals ( $X_{2.1}$ )	1.000
12	Finance & Investment ( $Y_{1.1}$ )	0.780
13	Corporate Governance ( $Y_{1.6}$ )	0.885

### Discriminant Validity

The discriminant validity test shows that all variables have the highest correlation in themselves compared to the correlation on other variables so that the discriminant validity requirements in the measurement model are met (Table 2).

Table 2. Discriminant Validity Test Results

Variables	Maqashid Sharia Index	Islamic Social Reporting Level	Level of Islamic Governance
Maqashid Sharia Index	1.000		
Islamic Social Reporting Level	0.141	0.834	
Level of Islamic Governance	-0.036	-0.446	0.893

### Reliability

Based on the results of the reliability test, it was obtained good results, namely that all variables had a score more than the rule of thumb 0.70, except for the Cronbach alpha score on the Islamic Social Reporting Level variable (Table 3). Thus it can be concluded that all variables in the measurement model have good reliability.

Table 3. Reliability Testing Results

Variables	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach alpha</i>
Level of Islamic Governance ( $X_1$ )	0.974	0.968
Maqashid Sharia Index ( $X_2$ )	1.000	1.000
Islamic Social Reporting Level ( $Y_1$ )	0.820	0.569

### Hypothesis Test

Based on the results of data processing with SmartPLS version 3 (Table 4), it is found that the first hypothesis is accepted and the second hypothesis is rejected. The research hypothesis is supported if the p-value is less than 0.05. In the first hypothesis, the test results show a p-value of 0.003 (<0.05) so that the first hypothesis is accepted. As for the second hypothesis, the results showed p values of 0.387 (> 0.05) so that the second hypothesis was rejected.



Table 4. Hypothesis Testing Results

H	Original Sample (O)	<i>T Statistics</i>	<i>P values</i>	Results
H <sub>1</sub>	-0,441	2,944	0,003	Significant
H <sub>2</sub>	0,125	0,865	0,387	Not significant

### **The Effect of the Level of Islamic Governance on the Level of Islamic Social Reporting**

The relationship between governance and social responsibility disclosure is generally described in the framework of legitimacy theory. Legitimacy theory explains the relationship between the level of Islamic governance and the level of social reporting disclosure. To get acceptance and approval from the community, companies need to take actions by the system of norms, values and beliefs of the community. In the case of an action to disclose information on social responsibility, it is an act by the system of norms, values and public beliefs. Likewise, the relationship between these two variables is explained by Indrawaty & Wardayati (2015) where both of them explain that the effectiveness of Islamic corporate governance is shown by Islamic social reporting. Companies that implement good governance will apply a broader level of Islamic social reporting disclosure.

For the variable level of Islamic governance, it is said that the higher the score for the level of Islamic governance indicates the implementation of Islamic governance is not good and vice versa, the lower the score for the level of Islamic governance indicates a better implementation of Islamic governance. The results of this study found that the better the implementation of Islamic governance carried out by Islamic banks, the more Islamic social reporting disclosures. Conversely, the less good the implementation of Islamic governance in Islamic banks, the less information on Islamic social responsibility disclosed by Islamic banks. The results of the current study have successfully confirmed the legitimacy theory.

The results also show that the better the level of Islamic governance carried out by Islamic banks, Islamic banks are able to control the behaviour of directors, boards of commissioners, sharia supervisory boards, committees, internal audit to take actions that generate benefits for the common interest, especially on the part of investors. Islamic banks can control the behaviour of internal parties to contribute to stakeholders.

One indicator of the level of Islamic governance is the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. The results of this study found that the better the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners affects the extent of Islamic social reporting disclosure which includes: finance & investment, products & services, employees, society, environment, and corporate governance. Based on descriptive analysis of data, the most information disclosed by Islamic banks is the disclosure of information about governance, society and the workforce which includes: information on the status of sharia compliance and activities that are prohibited; information regarding sadaqah, waqf, benevolence funds; information regarding employment, employee education and training, employee involvement, and the work environment. The results of this study support previous studies conducted by Sembiring (2006); Nurkhin (2010); Badjuri (2011); and Wiyuda & Pramono (2017) concerning the relationship between the board of commissioners and disclosure of corporate social responsibility. The increasing number of members of the board of commissioners has an impact on the broader disclosure of social responsibility. The current study does not use a measure of the number but uses a self-assessment score of the implementation of the duties and responsibilities of the board

of commissioners. Sembiring (2006) found that board size has a positive effect on corporate social responsibility disclosure. Nurkhin (2010) proves that the composition of independent commissioners has a positive effect on the level of corporate social responsibility disclosure. Wiyuda & Pramono (2017) found a positive influence from the board of commissioners on the level of corporate social responsibility disclosure. Badjuri (2011) proved that the independent board of commissioners has a positive effect on corporate social responsibility disclosure.

The results of this study indicate that the better the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors will affect the extent of Islamic social reporting disclosure. Among the indicators for the level of Islamic governance, the indicators for the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors obtain a high average score which indicates that the duties and responsibilities of the Board of Directors have been carried out properly. The results of this study support Othman et al. (2009) and Sunarto (2016). Othman et al. (2009) found that the composition of the board of directors for both Muslim and non-Muslim influenced companies to provide Islamic social reporting. Sunarto (2016) managed to find a positive influence on the number of members of the board of directors on the disclosure of Islamic social reporting. The greater the number of members of the board of directors is directly proportional to the extent of Islamic social reporting disclosure.

The third indicator from the level of Islamic governance is the completeness and implementation of committee duties. The more complete and better the implementation of committee duties is proven to affect the extent of Islamic social reporting disclosure. The results of this study support Barako et al. (2006) who found that the presence of an audit committee is an important factor that can be associated with the level of voluntary disclosure. The results of this study are different from Badjuri (2011) and Wiyuda & Pramono (2017). Badjuri (2011) did not find the effect of the audit committee on corporate social responsibility disclosure. Wiyuda & Pramono (2017) prove that the audit committee has a negative effect on the level of corporate social responsibility disclosure.

One of the important organs in a sharia bank that differentiates it from conventional banks is the sharia supervisory board (SSB). The results of the convergent validity test show that the indicators related to the sharia supervisory board (fourth indicator) are valid. Previous studies conducted by Farook & Lanis (2005); Dienes & Velte (2016); and Sunarto (2016) who tested directly the influence of the sharia supervisory board on corporate social responsibility disclosure with different results from one another. The results of the current research support several previous studies that have succeeded in proving the effectiveness of the sharia supervisory board on the level of corporate social responsibility disclosure, including Farook & Lanis (2005); Sunarto (2016); and Dienes & Velte (2016). In contrast, Dienes & Velte (2016) did not obtain empirical evidence regarding the effect of expertise, meeting frequency, and the size of the sharia supervisory board (SSB) on the level of corporate social responsibility disclosure. This study uses the object of research on Islamic banks in Germany.

One of the indicators of the level of Islamic governance is the implementation of sharia principles in the activities of raising funds and channelling funds and services. The results of this study indicate that the better the implementation of sharia principles in terms of collecting and distributing funds affects the extent of Islamic social reporting. This finding is interesting because there is a close relationship between the implementation of sharia principles and Islamic social reporting. Disclosure of social reporting is related to disclosure of information regarding usury, gharar, zakat activities; product halal status; work environment; sadaqah, waqf, charity; environment; as well as the status of sharia compliance and information on activities that are

prohibited by sharia. Islamic banks are required to collect and channel funds and distribute services in accordance with sharia principles because this can affect the extent of Islamic social reporting disclosures from Islamic banks. In addition, the results of this study also show that the implementation of the bank's compliance function, the application of the internal audit function, the application of external audits, and the transparency of financial and non-financial conditions, reports on the implementation of governance and internal reporting are proven to affect the extent of Islamic social reporting disclosure.

### **The Effect of the Maqashid Sharia Index on the Level of Islamic Social Reporting**

Legitimacy theory is a basic theory to explain the relationship between the maqashid sharia index and the level of disclosure of corporate social responsibility. In legitimacy theory, it is known as a social contract. In order for a company to be accepted by society, the company must fulfil a social contract with society through disclosures related to economic, social, and political factors (Hogner, 1982; Lehman, 1983; Lindblom, 1983). Based on this legitimacy theory, Islamic banks must disclose more information about their social responsibility to the public. This theory explains that the higher the maqashid sharia index should have an impact on the wider disclosure of corporate social responsibility. Aldrich & Fiol (1994) and Suchman (1995) reveal that socio-political legitimacy refers to the characteristics, attributes, and results of an organization against social norms that are acceptable or not. In accordance with Aldrich & Fiol (1994) and Suchman (1995), the maqashid sharia index as a measure of the performance of Islamic banks should contribute to an increase in the level of corporate social responsibility disclosure of Islamic banks.

The results of the current study are not in line with the concepts previously described. The results of the study did not find the effect of the maqashid sharia index on the level of Islamic social reporting. Thus, the results of this study fail to confirm the role of legitimacy theory in explaining the relationship between the maqashid sharia index and the level of Islamic social reporting. There are several reasons that can be put forward regarding the results of this study, especially in terms of data related to the maqashid sharia index and the results of previous empirical research.

*First*, in terms of data on the cost of education and training for a period of 7 years (2010-2016). Based on the results of the previous descriptive analysis, the cost of education and training in Islamic banks is still relatively low, namely an average of 1.1% during the 2010-2016 period. The largest ratio was obtained in 2013, namely 1.48%, while the lowest ratio was obtained in 2012 at 0.84% and in 2016 at 0.86%. There is even one Islamic bank that does not present information on education costs in financial statements and annual reports during the 2010-2016 period, namely Bank Jabar Banten Syariah (BJBS). This shows that Islamic banks in Indonesia still have not placed the costs of education and training in a large portion of their business cost allocation.

*Second*, in terms of research and development cost data for a period of 7 years (2010-2016). Based on research and development cost data, it is known that the average ratio of research and development expenses divided by total costs during the 2010-2016 period is relatively low at 0.2%. Some Islamic banks do not present research and development expenses as a cost item in their financial statements and annual reports. However, the ratio increased from 2010-2012 to 2013-2016. Research and development costs in the 2010-2012 period were only 0.05% and increased in the 2013-2016 period to 0.32%. Of the eleven Islamic banks, there are two Islamic banks, namely Bank Syariah Mandiri (BSM) and Bank Muamalat Indonesia (BMI) which consistently charge and present research and development burdens in financial statements (financial statements) and annual reports (annual reports) in the 2010 period. -2016. Apart from the two Islamic banks, Bank

Syariah Bukopin presents research and development expenses in the 2010-2013 period, while Bank Victoria Syariah presents research and development expenses in the 2013-2016 period.

*Third*, in terms of data on promotion costs for a period of 7 years (2010-2016). The promotion aspect relates to increasing public awareness of products and services in Islamic banks. Compared to previous costs, promotion costs reached a higher figure, namely 2.19% in the 2010-2016 period. However, in contrast to research and development costs, most Islamic banks have presented information on promotional costs in their financial statements and annual reports, except for Bank Victoria Syariah and Maybank Syariah. The two Islamic banks (Bank Victoria Syariah and Maybank Syariah) do not provide promotional fees in the 2010-2012 period. All Islamic banks have disclosed their promotional costs since 2013 so that the average ratio of promotional costs divided by total costs in the 2013-2016 period increased to 2.23% compared to the previous period 2010-2012 of 2%.

*Fourth*, in terms of the results of previous empirical research. The results of this study support the previous study by Hossain et al. (2006) and Sunarsih & Ferdiansyah (2017), where the two studies failed to prove the effect of company performance on the level of Islamic social reporting. In contrast, the results of the current study differ from previous studies conducted by Othman et al. (2009), where Othman et al. (2009) succeeded in proving empirically the effect of company performance on the level of Islamic social reporting. The better the company's performance has an impact on the wider the level of Islamic social reporting disclosure. The study of Othman et al. (2009) support the previous study from Deegan (2002) which found that companies that perform well tend to disclose corporate social responsibility at a wider level in order to gain legitimacy from the community so that they can maintain their performance in the future.

## **Conclusions**

Based on the results and discussion, in the maqashid sharia index variable, only indicators of educating individuals are valid and used in data analysis, while the other two indicators, namely building justice and public interest, do not meet convergent validity. As for the variable level of Islamic governance, all indicators meet convergent validity, except for the ninth indicator, namely the application of the external audit function. The other ten indicators meet convergent validity which includes: implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, completeness and implementation of Committee duties, implementation of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, implementation of sharia principles in fundraising and fund distribution activities. as well as services, handling of conflicts of interest, implementation of the Bank's compliance function, implementation of the internal audit function, Maximum Fund Distribution, as well as transparency of financial and non-financial conditions, GCG implementation reports and internal reporting.

The results showed that the level of Islamic governance affected the level of Islamic social reporting. The direction of the relationship is positive, indicating that the better the implementation of Islamic governance in Islamic banks can have an impact on increasing the disclosure of Islamic social reporting. These findings have successfully confirmed the role of agency theory and legitimacy theory in explaining the effect of governance on the level of Islamic social reporting. The maqashid sharia index does not affect the level of Islamic social reporting. These findings fail to confirm the role of legitimacy theory in explaining the effect of the maqashid sharia index on

the level of Islamic social reporting. The rationalization of the findings have been explained in terms of data and the results of previous empirical research.

In further research, it can be continued on other indicators of the maqashid sharia index, which can accommodate the concept of maqashid sharia in Indonesia, beyond the indicators that have been made by previous researchers, the majority of whom are from Malaysia. It is necessary to develop a separate and distinctly Indonesian maqashid sharia index indicator that better reflects the financial reports and annual reports of Islamic banks in Indonesia. Thus, different research findings will be generated from the current research results. On the object side of the research, further research may consider using other Islamic entity objects outside of Islamic banking, such as Islamic insurance, non-financial institution Islamic entities listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), Baitul Mal Wat Tamlik (BMT), and other Islamic entities.

## REFERENCES

- Abdulhaq, A. S., & Muhamed, N. A. (2015). Extent of Corporate Social Responsibility Disclosure and Its Determinants: Evidence from Kingdom of Saudia Arabia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law*, 7(1), 40-47.
- Abu Zahrah, M. (1997), *Usul al-Fiqh*, Cairo, Dar al-Fikr al-,,Arab
- Al-Ajmi, M., Al-Mutairi, A., & Al-Duwaila, N. (2015). Corporate Social Disclosure Practices in Kuwait. *International Journal of Economics and Finance*, 7(9), 244-254.
- Alarussi, A. S., Hanefah, M. M., & Selamat, M. H. (2009). Internet Financial and environmental Disclosures by Malaysian Companies. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 3(1), 3-25.
- Aldrich, H. E., & Fiol, C. M. (1994). Fools rush in? The Institutional context of industry creation. *Academy of Management Review*, 19(4), 645-670.
- Badjuri, A. (2011). Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme *Corporate Governance*, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Manufaktur dan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 38-54.
- Barako, D. G., Hancock, P., & Izan, H. Y. (2006). Relationship between corporate governance attributes and voluntary disclosures in annual reports: The Kenyan experience. *Financial Reporting, Regulation and Governance*, 5(1), 1-25.
- Belkaoui, A., & Karpik, P. G. (1989). "Determinants of the Corporate Decision to disclose Social Information", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 2(1), 36-51.
- Brammer, S., & Pavelin, S. (2008). Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure. *Business Strategy and the Environment*, 17(2), 120-136.
- Chapra, M. Umer, (1985), *Towards a Just Monetary System*, Leicester, The Islamic Foundation.

Chrisman, J. J., Chua, J. H., Kellermanns, F. W., & Chang, E. P. (2007). Are family managers agents or stewards? An exploratory study in privately held family firms. *Journal of Business Research*, 60(10), 1030-1038.

Cormier, D., Ledoux, M., & Magnan, M. (2011), 'The informational contribution of social and environmental disclosures for investors', *Management Decision*, Vol. 49, No. 8, pp. 1276-1304.

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, R. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47.

Deegan, C., Rankin, M., & Tobin J. (2002). An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosures of BHP from 1983-1997: A Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 15(3), 312 - 343.

Dhaliwal, D., Li, O.Z., Tsang, A., & Yang, Y.G. (2011). Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: the initiation of corporate social responsibility reporting. *Accounting Review*, 86(1), 59-100.

Dienes, D., & Velte, P. (2016). The Impact of Supervisory Board Composition on CSR Reporting: Evidence from the German Two-Tier System. *Sustainability*, 8(63), 1-20.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57-74.

Farook, S. & Lanis, R. (2005). Banking on Islam? Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure. <http://www.afaanz.org/web2005/papers>.

Gunarsih, T. (2003). *Struktur Kepemilikan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance*. Kompak Nomor 8.

Habbash, M. (2016). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Saudi Arabia. *Journal of Economic and Social Development*, 3(1), 87-103.

Hackston, D. & Milne, M. J., (1996). Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 9(1), 77-100.

Hogner, R. H., (1982). Corporate social reporting: 8 decades of development at US Steel, *Research in Corporate Social Performance and Policy*, 4, 243-250.

Hossain, M. A., Islam, K. S., & Andrew, J. (2006). Corporate Social and Environment Disclosure in Developing Countries: Evidence from Bangladesh. *Proceedings of the Asian Pacific Conference on International Accounting Issues*. Hawaii.

Indrawaty & Wardayati, S. M. (2015). Implementing Islamic Corporate Governance (ICG) and Islamic Social Reporting (ISR) in Islamic Financial Institution (IFI). *3rd Global Conference on Business and Social Science*, 16-17 December, Kuala Lumpur, Malaysia.

Istianingsih. (2015). Impact of Firm Characteristics on CSR Disclosure: Evidence from Indonesia Stock Exchange. *IJABER*, 13(6), 4265-4281.

Jazil, T., & Syahrudin. (2013). The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian: Islamic Banks based on the Maqasid al-Shari'ah Approach. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 7(2), 279-301.

Kasri, R. A. (2016). *Maqasid al-Shariah* and Performance of Zakah Institutions. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9, 19-41.

Khasharmeh, H. A., & Desoky, A. M. (2013). Online Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of the Gulf Cooperation Council (GCC) Countries. *Global Review of Accounting and Finance*, 4(2), 39-64.

Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good Corporate Governance dan Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *JAAI*, 19(2): 126-136.

Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(1), 75–100.

Lehman, C. (1983). Stalemate in Corporate Social Responsibility Research', *American Accounting Association Public Interest Section*, Working Paper.

Lestari, P. (2013). Determinants of Islamic Social Reporting in Syariah Banks: Case of Indonesia. *International Journal of Business and Management Invention*, 2(10), 28-34.

Lindblom, C. K. (1983). The concept of organisational legitimacy and its implications for corporate social responsibility disclosure. *American Association Public Interest Section*, Working paper.

Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social Reporting by Islamic Banks. *ABACUS*, 42(2), 266-289.

Mohammed, M. O., & Taib, F. Md. (2009). *Testing The Performance Measured Based on Maqashid al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks*. Malaysia: IIUM.

Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. Md. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqashid syariah. *International Islamic University Malaysia Journal*.

Nurkhin, A. (2010). *Corporate Governance dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(1), 46-55.

Othman, R., Thani, A. Md., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 12(12), 4-20.

Othman, R., & Thani, A. Md. (2010). Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia. *International Business & Economics Research Journal*, 9(4): 135-144.

Rama, A., & Meliawati. (2014). Analisis Determinan Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. *Equilibrium*, 2(1), 84-103.

Rosmasita, H. (2007). Factors - Factors affecting social disclosure (Social Disclosure) in the annual financial statements of manufacturing companies in the Jakarta Stock Exchange. *Indonesia Journal of Accounting Research* Vol. 7.

Rufino, M. A., & Machado. M. R. (2015). Determinants of Voluntary Social Information Disclosure: Empirical Evidence in Brazil. *Journal of Education and Research in Accounting*, 9(4), 367-383.

Salman, K. R., Amir, Farid, M., & Budiana, K. M. (2018). New Evidence of the Effect of Tax Aggressiveness and Corporate Characteristics on the Level of Corporate Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9): 1263-1272.

Sanrego, Y. D. (2010). Maqashid Indeks untuk Bank Syariah. *SHARING Inspirator Ekonomi & Bisnis Syariah*. Edisi 41.

Sembiring, E. R. (2006). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Maksi*, 6(1), 69-85.

Setyorini, C. T., & Ishak, Z. (2012). Corporate Social and Environmental Disclosure: A Positive Accounting Theory View Point. *International Journal of Business and Social Science*, 3(9): 152-164.

Suchman, M. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20, 571-610.

Sunarsih, U., & Ferdiansyah. (2017). Determinants of the Islamic Social Reporting Disclosure. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 9(1): 69-80.

Sunarto, C. N. (2016). Shariah Governance Dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting Index dan Global Reporting Index pada Perbankan Syariah Periode 2010-2013. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1): 30-57.

Suttipun M., & Stanton, P. (2012). The Differences in Corporate Environmental Disclosures on Websites and in Annual Reports: A Case Study of Companies Listed in Thailand, *International Journal of Business and Management*, 7(14): 18-31.



Thomas, A. H. (2006). Corporate internal investigations: Balancing firm social reputation with board fiduciary responsibility. *Corporate Governance*, 6(5), 635-642.

Wiyuda, A., & Pramono, H. (2017). Pengaruh *good corporate governance*, karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan terdaftar di BEI. *Kompartemen*, 15(1), 12-25.

Zeng, T. (2016). Corporate Social Responsibility, Tax Aggressivity and Firm Market Value *Accounting Perspectives*, 15(1): 7-30.